

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**DAMPAK BANTUAN TERNAK SAPI BIBIT
TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Kelurahan Tanjung Harapan
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

DESI TODING DATU

NIM. 018396449

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul DAMPAK BANTUAN TERNAK SAPI BIBIT TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, 2013

Yang Menyatakan



(Desi Toding Datu)

NIM. 018396449

ABSTRAK

DAMPAK BANTUAN TERNAK SAPI BIBIT TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI (Studi kasus pada kelompok tani Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)

DESI TODING DATU
ddesitoding@ymail.com

Penelitian tentang "Dampak Bantuan Ternak Sapi Bibit terhadap Kesejahteraan Petani (Studi kasus pada kelompok tani kelurahan Tanjung Harapan kecamatan Nunukan kabupaten Nunukan) dilakukan di kelurahan Tanjung Harapan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan sejauhmana upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui penyaluran ternak sapi bibit agar tepat sasaran serta menganalisis pola pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terkait terhadap petani penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan Paradigma Kualitatif, digunakan untuk mengetahui lebih mendalam tentang objek yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan menerapkan model analisis data interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan menghasilkan kelompok tani yang baru mencapai tahap tumbuh belum pada tahap mandiri dilihat dari aktivitas yang dilakukan kelompok tani sasaran. Dalam mengelola ternaknya tergantung kepada jumlah ternak yang dimiliki, artinya apabila ternak hanya 1 (satu) ekor maka perhatiannya tidak sepenuhnya tercurah pada ternak tersebut karena tidak efisien dan tidak memperlihatkan keberhasilan dalam peningkatan populasi, tetapi apabila ternaknya 2 (dua) ekor atau lebih maka perhatian lebih besar pada ternak tersebut dan tentunya akan memperlihatkan hasil yang maksimal. Sehingga disimpulkan bahwa dampak bantuan ternak sapi bibit kepada masyarakat di kabupaten Nunukan dengan pola pembagian 1 ekor/KK kepada setiap anggota kelompok tani tidak memperlihatkan peningkatan kesejahteraan karena petani tidak fokus memelihara ternak khususnya pada kelompok tani Sinar Seimengklau tetapi dengan menerapkan pola pembagian 2 ekor/KK kepada setiap anggota kelompok tani, tingkat populasi ternak yang dihasilkan cukup meningkat, hal ini disebabkan karena adanya kesadaran dan perhatian dari setiap anggota kelompok untuk memelihara ternaknya baik dari segi kualitas pakan, adanya pemahaman akan pentingnya teknologi inseminasi buatan serta adanya rutinitas dari petugas medis dan paramedis untuk melakukan pengobatan atau vaksinasi terhadap ternak dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyakit menular ternak. Dengan memperhatikan temuan di atas, disarankan agar pemerintah daerah memprogramkan pola pembibitan dikombinasi dengan budidaya (penggemukan) dengan pembagian 5 ekor ternak sapi, untuk bibit 3 ekor dan untuk budidaya 2 ekor. Untuk mencapai tujuan dari program dinas, pelaksanaan verifikasi dan seleksi calon penerima supaya dilaksanakan secara selektif sehingga bantuan dapat mencapai sasaran.

Kata kunci : Ternak sapi bibit, pemberdayaan, pendapatan, kesejahteraan, kelompok tani Sipurennu, Kelurahan Tanjung Harapan

ABSTRACT

IMPACT ASSISTANCE LIVESTOCK BEEF CATTLE ORIGIN TO PROSPERITY OF FARMER (Case study to the group of farmer in Tanjung Harapan Villages, Sub District South Nunukan, District Nunukan)

DESI TODING DATU
ddesitoding@ymail.com

Research on "Impact Assistance Livestock Beef Cattle Origin to Prosperity of Farmer (case study to the group of farmer in Tanjung Harapan Village, Sub District South Nunukan, District Nunukan" was conducted in Tanjung Harapan Villages. The goal of this research to increase prosperity of farmer through giving beef origin livestock efficiently and to analyse type of controlling and restraint which is done by district government to farmer who receives aid. This research used qualitative paradigm used to know more deepen about the object will be researched. The data was collected by observation, documentation and interview then analyzed by applying model analyzed of interactive data developed Miles and Huberman (1992), that to be include collecting data, reducing data, presentation and conclusion data. The result of research showed that efforts has done that build a farmer group just reach growing level not yet to autonomy level. It can be seen at the activities by farmer group target. In breeding livestock, it depends on the number of their livestock. It means that if they have only one livestock, their attention not full time to the livestock because not efficiently and it does not show successfully in increasing population, but if they have two livestock or more, their attention fully to the livestock and also it can show the maximal result. Therefore, it was concluded that impact assistance livestock beef cattle origin to the peoples in district Nunukan by system giving one livestock to a family of each farmer group not showing increasing prosperity of peoples because the farmer does not focus on looking after the livestock, especially the farmer group Sinar Seimangkadu but by system giving two livestock to a family of each farmer group, the upgrading population of livestock which produced is more significant. This caused by awareness and attention of each member family to look after their livestock of its food quality; there is a understanding about importantly artificial insemination technology; and also the official medical do treatment or vaccination to the livestock annually to make preventively to infecting disease the livestock. Base on the result research above, it is suggested to the district Nunukan Government to plan a breeding system combine with livestock cultivation by giving 5 beef cattle; 3 beef cattle; 3 beef cattle for breeding and two beef cattle for cultivation. To reach the objective of official planning, the implementation of verification and selection receiver candidate was done selectively so the assistance can, touch main objective.

Keywords : Beef origin livestock breeding, income, prosperity, the farmer group Sipurennu, Tanjung Harapan Village

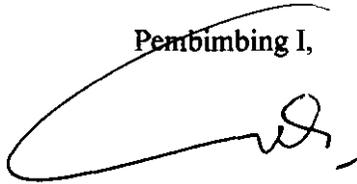
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul TAPM : **DAMPAK BANTUAN TERNAK SAPI BIBIT
TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI (Studi
Kasus pada Kelompok Tani Tanjung Harapan
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan)**

Penyusun TAPM : **Desi Toding Datu**
NIM : **018396449**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik (MAP)**
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Samodra Wibawa, M.Sc
NIP. 19650827 199103 1 001

Pembimbing II,



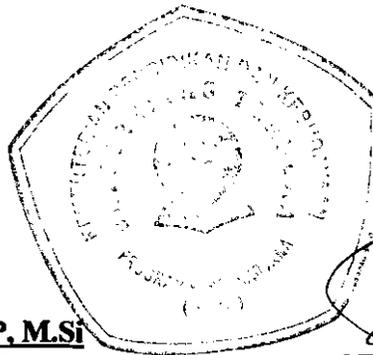
Dr. Ir. Amalia Sapriati, MA
NIP. 19600821 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001



Direktur
Program Pascasarjana



Sueiati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Desi Toding Datu
 NIM : 018396449
 Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
 Judul Tesis : Dampak Bantuan Ternak Sapi Bibit terhadap Kesejahteraan Petani (Studi kasus pada kelompok tani Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 September 2013
 Waktu : 12.00 – 13.00

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Surachman Dimiyati, M.Ed.,Ph.D

Penguji Ahli : Dr. Mujibur Rachman Khairul Muluk, M.Si

Pembimbing I : DR. Samodra Wibawa, M.Sc

Pembimbing II : Dr. Ir. Amalia Sapriati, MA

.....

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Kajian Penelitian Terdahulu	8
a. Pemberdayaan Masyarakat	8
b. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	13
c. Petani (Kehidupan Petani)	15
d. Upaya Pemerintah dalam Penyediaan Ternak Sapi	17
2. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Tani Usaha Peternakan	19
B. Kerangka Berpikir	30
C. Definisi Konseptual dan Operasional	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Sumber Data	34
D. Instrumen Penelitian	35
E. Prosedur Pengumpulan Data	36
1. Proses memasuki lokasi penelitian (<i>getting in</i>)	36
2. Ketika berada di lokasi penelitian (<i>getting along</i>)	36
3. Mengumpulkan data (<i>logging the data</i>)	36
a. Wawancara mendalam (<i>in-dept interview</i>)	37
b. Data sekunder	37
c. Observasi	37
d. Kuesioner	37

F. Metode Analisis Data	38
1. Pengumpulan data (<i>data collection</i>)	39
2. Data reduction (<i>reduksi data</i>)	39
3. Data display (<i>penyajian data</i>)	39
4. Menarik kesimpulan/verifikasi	40
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Ternak Sapi Bibit Untuk Kesejahteraan Petani di Kelurahan Tanjung Harapan	46
1. Kesesuaian Pelaksanaan Program Dengan Standar Pelaksanaan	46
2. Fasilitas Sumberdaya Yang Digunakan	51
3. Identifikasi Kelompok dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan	54
a. Identifikasi Kelompok	54
b. Sosialisasi	57
c. Pengawasan	68
C. Sasaran Yang Dicapai Pada Bantuan Ternak	72
1. Terwujudnya Kelompok Tani Yang Mandiri	72
2. Tersusunnya Program Pada Kelompok Tani	85
D. Dampak Bantuan Ternak Terhadap Kesejahteraan Petani Penerima	90
1. Pertambahan Populasi Ternak	90
2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani	99
BAB. V PENUTUP	105
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Konsep Model Berpikir	30
Gambar 2. Model Interaktif Analisis Data	38
Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan Seleksi dan Validasi Kelompok Sasaran	65
Gambar 4. Mekanisme Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Peternak dan Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) atau Rencana Usaha Bersama (RUB)	67

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Tingkat Pendidikan Formal Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan	52
Tabel 2.	Jenis Pelatihan Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan	53
Tabel 3.	Perkembangan Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu Hingga Desember 2012	73
Tabel 4.	Proporsi Penggunaan Dana PMUK Budidaya Ternak Potong Berdasarkan Jenis Ternak Potong dan Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu	81
Tabel 5.	Luas Kepemilikan Lahan dan Kebun Hijauan Pakan Ternak Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu	86
Tabel 6.	Perbandingan/Perbedaan antara Kelompok Tani Sipurennu dengan Kelompok Tani Sinar Seimengkadu Berdasarkan pada Beberapa Dimensi sebagai Tolak Ukur	90
Tabel 7.	Jumlah Populasi Awal dan Populasi Akhir Ternak Sapi Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu	93
Tabel 8.	Jumlah Populasi Awal dan Populasi Akhir Ternak Sapi Kelompok Tani Sinar Seimengkadu	94
Tabel 9.	Mata Pencaharian/Sumber Ekonomi Keluarga Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu	101
Tabel 10.	Perbandingan/Perbedaan antara Kelompok Tani Sipurennu dengan Kelompok Tani Sinar Seimengkadu Berdasarkan pada Beberapa Dimensi sebagai Tolak Ukur	104

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Ciri-Ciri Tahapan Perkembangan Kelompok (Bidang Organisasi, Usaha, Permodalan dan Jaringan Kerja)	113
Lampiran 2. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	119
Lampiran 3. Kartu Wawancara dan Kuesioner	120

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu keberhasilan dan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah seberapa besar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan termasuk didalamnya adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan bibit sapi. Penelitian tersebut dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ternak sapi bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, dan juga ingin mengetahui perubahan kehidupan dan pendapatan petani penerima bantuan tersebut, agar dapat menjadi tolak ukur untuk program pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

Berbagai upaya yang dilakukan sangat penting bila dikaitkan dengan Program Nasional Swasembada Daging Sapi dengan melepaskan ketergantungan impor bakalan/daging dari luar negeri. Untuk itu kita harus mampu memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang kita miliki secara optimal dalam berbagai hal, seperti perbaikan mutu bibit, ketersediaan pakan ternak dan pendayagunaan potensi sumberdaya manusia peternak dengan skala kepemilikan ternak sapi rata-rata 5 ekor /keluarga. Kebutuhan daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang seimbang, pertambahan penduduk dan

meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut yaitu dengan meningkatkan populasi, dan produktivitas ternak sapi. Untuk itu bibit sapi khususnya sapi potong merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan pembibitan sapi secara berkelanjutan.

Sejak terbentuknya Kabupaten Nunukan tahun 1999, maka mulai tahun 2001 bantuan sapi bibit diterima oleh petani baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah II (APBD II) maupun bantuan dari pusat. Populasi sapi bibit yang ada di kabupaten Nunukan sejak tahun 2001 sampai tahun 2012 adalah sejumlah 7.102 sedangkan jumlah ternak yang telah didistribusikan kepada masyarakat terdiri atas APBD II sebanyak 907 ekor, APBN sebanyak 862 ekor dan APBD I sebanyak 788 ekor. Pembagian kepada petani tidak seragam, ada yang 1 ekor, 2 ekor dan 3 ekor per keluarga.

Pembibitan sapi ini masih berbasis pada peternakan rakyat yang berciri skala usaha kecil, manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi seadanya, lokasi tidak terkonsentrasi di suatu wilayah untuk mempermudah pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan sapi yang baik. Dengan demikian, sudah saatnya usaha peternakan utamanya ternak sapi secara nasional dilaksanakan dengan perlunya prioritas kepada industri pembibitan dan pembesaran disamping usaha penggemukan, serta mulai berorientasi kepada pemberdayaan kelompok tani pada usaha agribisnis peternakan. Perubahan tersebut sangat diperlukan dalam

mempersiapkan industri ternak potong nasional untuk mengimbangi harga pasar, dimana harga daging sapi di Indonesia merupakan harga yang tertinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tahun 2001, Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan dana APBN untuk implementasi program bantuan sosial, dan diharapkan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), khususnya Kabupaten Nunukan dapat mensinergikan masing-masing program/kegiatanannya tersebut dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Nunukan membuat suatu kebijakan dan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pembibitan sapi potong dengan mengalokasikan dana APBD untuk mendistribusikan bibit ternak sapi kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat petani/peternak.

Pengembangan usaha budidaya ternak sapi di kabupaten Nunukan akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah Daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat peternakan melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, pembuatan embung, pasar hewan, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok tani. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan, disamping itu pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam

pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Penelitian ini mengkhususkan pada pemberdayaan kelompok tani yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya Kelompok Tani Usaha Peternakan Sipurennu yang bergerak dalam bidang peternakan sapi potong yang mendapat bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004, dimana pengadaan sapi tersebut diadakan sendiri oleh kelompok tanpa melalui pihak ketiga.

Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan ternak sapi yang telah didistribusikan kepada kelompok tani dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi petani yang mendapat bantuan. Penelitian ini menggambarkan kondisi aktual dan kebutuhan nyata terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan khususnya dalam pengembangan pembibitan dan pengembangan sapi potong. Hasil penelitian kemudian ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bantuan ternak sapi yang disalurkan pemerintah kabupaten Nunukan, serta dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Nunukan.

Tujuan dari pemberdayaan kelompok ini sebagaimana dalam pedoman umum Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) Bantuan Usaha Ekonomi Anggaran 2004 adalah :

1. Mendorong berkembangnya usaha pertanian dan atau peternakan yang berwawasan bisnis.
2. Menghasilkan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian dan atau peternakan.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi wilayah.

Indikator atau kriteria penilaian dan evaluasi keberhasilan program pemberdayaan kelompok sebenarnya bisa dilihat langsung dari input dan output program. Secara mudah dapat dikatakan bahwa program dikatakan telah berhasil apabila program dapat berfungsi “umpan balik” sehingga kemudian masyarakat dapat termotivasi sendiri untuk melaksanakan program secara mandiri, sebaliknya jika masyarakat hanya melakukan ketika program masih berjalan dapat dikatakan bahwa program tidak berhasil.

Sejauh ini awal pelaksanaan program pemberdayaan kelompok peternakan ini tampak cukup baik bila dilihat dari indikator pelaksanaan proyek, yaitu tersalurnya dana penguatan modal langsung kepada kelompok dan efektifnya pemanfaatan dana tersebut sesuai bidang usaha dan skala prioritas kebutuhan kelompok. Namun apakah esensi dari program pemberdayaan kelompok itu sendiri dikemukakan di atas sudah dapat dikatakan tercapai belum dapat dijawab karena pemberdayaan masyarakat pedesaan bukan semata-mata bertujuan untuk melahirkan output yang diinginkan seperti meningkatnya produk usaha kelompok tetapi “proses” dari kegiatan tersebut yang dapat menjadi bahan pembelajaran secara “*bottom up*”, yaitu partisipasi anggota didalam pengambilan keputusan

kegiatan-kegiatan usaha kelompok dari perencanaan sampai proses pelaksanaan hingga monitoring dan pengawasan dan adanya peningkatan kapasitas kelompok sehingga memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber-sumber data yang ada sehingga dapat mensejahterakan anggotanya secara mandiri. Hal tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana dampak bantuansapi bibit terhadap kesejahteraan petani, khususnya yang terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu sejauh mana dampak kebijakan pemerintah pada bantuan bibit ternak terhadap kesejahteraan petani. Dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan ternak sapi bibit kepada petani ?
2. Sejauh mana sasaran hasil yang dicapai dari bantuan ternak ?
3. Apa dampak dari pelaksanaan program tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan sejauh mana upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui penyaluran ternak sapi bibit agar tepat sasaran serta menganalisis pola pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terkait terhadap petani penerima bantuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terutama instansi terkait dalam pendistribusian bantuan bibit ternak sapi kepada masyarakat di pedesaan, khususnya terhadap kelompok tani usaha agribisnis peternakan yang relevan dengan dinamika pembangunan sosial-ekonomi di daerah dan sebagai bahan evaluasi efektivitas program kebijakan pemerintah dalam memberi bantuan ternak sapi kepada kelompok tani yang tercakup dalam program peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi.
2. Kegunaan secara akademis penelitian ini adalah sebagai wujud kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep pembangunan untuk merevisi pola bantuan pemberdayaan kelompok tani dan menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai upaya pemberdayaan terhadap kelompok tani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Penelitian Terdahulu

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan dalam diri manusia dan merupakan suatu sumber kreativitas yang ada dalam diri setiap orang secara luas tidak ditentukan oleh orang lain. Hikmat (2001) berpendapat bahwa pemberdayaan peternak merupakan sebuah metode pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan orang atau masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya atau suatu usaha dalam membantu orang biasa untuk meningkatkan lingkungannya dengan melakukan aksi kolektif dalam bidang ekonomi, penguatan sosial atau pengembangan sektor nonprofit.

Karsidi (2008) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi.

Menurut Prasojo, dkk. (2011) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berjalan terus menerus dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama melakukan hal berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian
3. Menerapkan rencana tersebut
4. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Monitoring dan Evaluasi – M & E)

Berdasarkan kondisi tersebut, pendekatan perencanaan masyarakat, yaitu partisipatif dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat, yaitu model 'Pemberdayaan Masyarakat'.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" seperti yang dikatakan oleh Chamber (1995) dalam Kartasmita(1996:8). Konsep ini lebih luas dari hanya memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety needs*) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu (Kartasmita, 1996 : 8).

Selanjutnya Hendayana (2008), menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk : a) meningkatkan kemampuan kelompok - kelompok masyarakat dalam berprakarsa untuk menangkap berbagai peluang ekonomi, b) mendorong tumbuhnya masyarakat swadaya yang siap berkembang sendiri dalam mengatasi berbagai kendala/ kelemahan yang dimilikinya, c) memperkuat dan

mengoptimalkan lembaga-lembaga formal dan informal di tingkat pedesaan serta meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat.

Menurut Hardiyanto (2007), pemberdayaan petani peternak dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman baik melalui penyuluhan maupun komunikasi antar-peternak agar mereka mampu memperbaiki sistem pengelolaan usaha peternakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contoh bentuk pemberdayaan petani peternak ialah mengikutsertakan petani dalam pengambilan keputusan mengenai program pemerintah yang akan dijalankan menyangkut masalah peningkatan produktivitas peternakan seperti, mengajarkan peternak proses inseminasi buatan (IB), pengolahan sumber daya lokal (sisa hasil pertanian) sebagai bahan pakan berkualitas, pelatihan pemanfaatan sisa hasil peternakan menjadi pupuk dan sebagainya. Sedangkan menurut Cook dan Macaulay (1998), pemberdayaan adalah merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu mempergunakan kemampuan untuk meraih tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan Pedoman Umum yang diterbitkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011) bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usahanya secara berkelanjutan .

Berbagai masalah yang dihadapi peternak cukup menjadi kendala dalam mengembangkan usahanya. Adapun strategi pemberdayaan yang dapat ditempuh menurut Arifin (2009) adalah melakukan hal berikut:

- (a) Mengembangkan usaha ternak melalui optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, untuk meraih peluang yang ada berupa perluasan usaha
- (b) Mendorong terjadinya konsolidasi antar peternak
- (c) Melakukan diversifikasi usaha sebagai langkah antisipasi dari kemungkinan gagalnya usaha ternak.

Menurut Abdurrahman (2010), dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, upaya tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) penumbuhan lembaga pelayanan penyuluhan dan peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat pedesaan; (2) fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di pedesaan berdasarkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan pembelajaran dari program-program pemberdayaan masyarakat; (3) pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan pedesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (4) peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan pedesaan; (5) koordinasi pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan pedesaan; dan (6) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran pemilik kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan kawasan pedesaan.

Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar, merupakan sebuah konsep yang menghubungkan *power* dengan pembagian kesejahteraan. Keadaan keterbelakangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau

akses pada sumber-sumber *power* mengakibatkan lapisan masyarakat tertentu tidak memiliki akses yang memadai terhadap aset produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang “memiliki *power*”. Oleh karena itu pemberdayaan bertujuan dua arah, pertama, melepaskan belenggu kemiskinan atau keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan (Abipraja, 2002 : 35).

Menurut Kartasmita (2001 : 13), perubahan yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati, begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain, memberdayakannya. Pemberdayaan memiliki tiga ciri penting sebagaimana diungkapkan oleh Miarsono (dalam Anonymous, 2003 : 25), yaitu : 1) motivasi pribadi (*self motivated*), yaitu motivasi untuk memberdayakan diri ; 2) dari bawah ke atas (*bottom up*), yaitu bahwa penyusunan program harus mengetahui karakter pembangunan ditempatnya agar tepat sasaran dengan pendekatan *bottom up*, dari masyarakat sendiri ; 3). orientasi potensi (*potent oriented*), yaitu menyangkut potensi yang ada pada masyarakat yang harus diberdayakan.

Selain itu pemberdayaan menyangkut perubahan bukan hanya kemampuan, melainkan juga sikap, maka menurut Kartasmita (1996:13),

pemberdayaan adalah sebuah konsep kebudayaan. Menurut pandangan ini maka pemberdayaan masyarakat tidak hanya akan menghasilkan emansipasi ekonomi dan politik masyarakat lapisan bawah, tetapi juga akan menjadi wahana transformasi budaya.

Pemberdayaan dengan demikian bukan hanya konsep ekonomi atau hanya konsep politik, tetapi merupakan konsep menyeluruh atau yang berada pada posisi belum dimanfaatkan secara penuh potensinya melalui pemberdayaan diharapkan dapat meningkat bukan hanya ekonominya, melainkan juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas maka pemberdayaan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat potensi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

b. Konsep Kesejahteraan Petani

Menurut Poerwadarminta (1986:376), taraf hidup adalah tingkat kesejahteraan sedangkan kesejahteraan berarti kemakmuran dan kesenangan hidup karena serba cukup (mewah, tidak kekurangan). Definisi tersebut menunjukkan konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan sistem adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalah

maupun dalam memenuhi kebutuhannya, untuk itu pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu aktivitas yang terorganisasi yang ditujukan untuk membantu tercapainya suatu penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pekerjaan sosial sendiri berada pada posisi sebagai profesi yang bertugas menyelenggarakan serta membantu manusia menggunakan program-program/pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah kesejahteraan masyarakat mengacu pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan bukanlah semata-mata menunjuk pada kemakmuran yang bersifat fisik atau ekonomi saja (Suharto, 2006).

Menurut Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011), skema bantuan sosial khususnya bantuan bibit ternak sapi dari pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ternak melalui bantuan langsung kepada anggota kelompok tani. Desain program bantuan sosial yang efektif dan efisien, erat kaitannya dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kelayakan penerima bantuan misalnya ketersediaan lahan untuk pengembalaan, ketersediaan hijauan pakan ternak, dan kesanggupan penerima bantuan dalam memelihara ternak yang diberikan dengan menandatangani kontrak perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan petani ternak.

Menurut Gunawan (1997), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi mencerminkan upaya mewujudkan kemandirian daerah yang transparan dan akuntabel antara komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki secara terukur dan berkelanjutan. Kondisi ini dapat berlangsung dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu : 1) partisipatif; 2) transparansi; dan 3) akuntabilitas. Partisipatif dalam proses pembangunan diantaranya melalui berbagai program kebijakan pembangunan pertanian dimaksudkan agar dapat menjembatani antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat petani di pedesaan. Selain itu, makna partisipatif juga diharapkan dapat menggugah kesadaran publik bahwa terjadinya keberhasilan maupun kegagalan proses pembangunan pertanian dipedesaan bukan tanggungjawab pemerintah semata, melainkan sangat tergantung pada keberhasilan keterlibatan masyarakat petani dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut, dari awal hingga akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

2. Petani

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga menggarap lahan, dan buruh tani. Secara umum, petani bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian

besar di antaranya, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang padat penduduk di Asia Tenggara, hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut pandangan Scott (1976), konsep mengenai petani kecil atau *peasant* sekurang-kurangnya mengacu pada tiga pengertian yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa istilah *peasant* ditujukan kepada semua penduduk pedesaan secara umum, tidak peduli apapun pekerjaan mereka. Konsep kedua yang menyatakan bahwa *peasant* tidak mencakup seluruh pedesaan, tetapi hanya terbatas kepada penduduk pedesaan yang bekerja sebagai petani saja. Konsep ketiga atau terakhir menyatakan bahwa *peasant* ditujukan untuk menunjukkan golongan yang lebih terbatas lagi, yaitu hanya kepada petani yang memiliki lahan pertanian, yang menggarap sendiri lahan tersebut untuk mendapatkan hasil yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya, bukan untuk dijual, atau yang di Indonesia biasa disebut sebagai petani pemilik penggarap.

Memperkuat definisi di atas, Reidfield (1982) memberikan tambahan definisi *peasant* atau "masyarakat kecil" menurutnya adalah orang-orang desa yang mengendalikan dan mengolah tanah untuk menyambung hidupnya dan sebagai suatu bagian dari ciri hidup lama yang melihat kepada dan dipengaruhi oleh kaum bangsawan atau orang kota yang melihat kepada dan dipengaruhi oleh kaum bangsawan atau orang kota yang cara hidupnya serupa dengan mereka namun dalam bentuk yang lebih berbudaya.

Pendefinisian *peasant* dalam pendekatan sistem ekonomi sangat beragam namun para ahli sependapat bahwa *peasant* pada dasarnya identik dengan kesederhanaan, keterbatasan dekat dengan garis subsistensi dan lain

sebagainya. Senada dengan Scott (1982), berpendapat bahwa sistem ekonomi *peasant* adalah satu sistem ekonomi dengan teknologi dan keterampilan sederhana, pembagian kerja sederhana, hubungan dengan pasar yang sangat terbatas, alat produksi dikuasai dan diorganisasi secara non-kapitalistik, dan skala produksi kecil.

Dalam sosiologi Barat disebut “peasant” (*subsistence farmers*) (Soetrisno, 2002). Kedua, kelompok petani yang secara aktif mencari metode-metode baru, pengetahuan mereka banyak bertambah dari tahun ke tahun dan mereka mengharapkan masa depan yang jauh lebih baik, yang menurut Soetrisno (2002) disebut *farmers*. Kedua kelompok petani tersebut selanjutnya memperlihatkan perkembangan usaha yang berbeda. Di satu sisi mereka termasuk peternak skala kecil (pemilikan ternak paling banyak 4 ekor) dan di sisi lain merupakan peternak skala besar (pemilikan ternak di atas 7 ekor).

3. Upaya Pemerintah dalam Penyediaan Ternak Sapi

Menurut Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011), peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani dapat dilakukan antara lain melalui: (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur peternakan termasuk infrastruktur perbenihan/perbibitan; (2) penguatan kelembagaan peternak melalui penumbuhan dan penguatan kelompok peternak dan gabungan kelompok peternak; (3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga

penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan peternakan melalui perluasan akses peternak ke sistem pembiayaan; (5) penciptaan sistem pasar yang menguntungkan peternak; dan (6) pengembangan kapasitas pelaku agribisnis melalui pelatihan.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha tani yaitu keterbatasan modal peternak serta lemahnya organisasi usaha dan jejaring kerjanya sehingga akses informasi menjadi terkendala. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah sejak tahun 2001 merintis pola pemberdayaan seperti ini melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi Bantuan Sosial berupa bantuan dana yang langsung ditransfer ke rekening kelompok atau dalam bentuk barang. Dana Bantuan Sosial ini dialokasikan dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok menjadi lembaga usaha mandiri yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan peternakan yang akan menjadi embrio tumbuhnya lembaga usaha peternak yang kokoh di kawasan pembangunan wilayah.

Bibit mempengaruhi produktivitas ternak. Kondisi ternak sapi lokal saat ini telah mengalami degradasi produksi dan bentuk tubuhnya kecil (Wijono, *et al.* 2003). Hal ini karena mutu genetik sapi lokal makin menurun. Makin baik bibit yang digunakan, walaupun dari bibit lokal tetapi diseleksi, produktivitas makin meningkat. Demikian halnya dengan pakan yang diberikan; makin baik pakan, produktivitas ternak makin meningkat. Pakan merupakan sarana produksi yang

sangat penting bagiternak karena berperan sebagai pemacupertumbuhan. Namun, dalam usahapenggemukan, selain pakan juga perlu diperhatikan aspek pemeliharaan, seperti perbaikan kandang dan pemanfaatan limbah untuk pakan. Hendayana dan Yusuf (2003) menyatakan, untuk menjamin keberlanjutan usaha, perlu upaya menanam tanaman pakan dan membuat hay (rumpun dan jerami).

4. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Tani Usaha Peternakan

Proses pemberdayaan (*empowerment*) adalah suatu kondisi yang dapat menumbuhkan kemandirian petani-peternak melalui pemberian kekuatan atau daya. Menurut Bryant dan White (1982), pemberdayaan adalah pemberian kesempatan untuk secara bebas memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan. Petani juga diberi kesempatan untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam memberikan respon terhadap perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya.

Scott dan Jaffe (1994) mencirikan pemberdayaan petani-peternak sebagai upaya meningkatkan kepuasan kerjameningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memberikan kebebasan berkreasi serta mengembangkan hal-hal baru, pengawasan dilakukan melalui berbagai keputusan bersama, pemberian tugas lengkap tidak parsial, berorientasi pada kepuasan orang yang dilayani dan memenuhi kebutuhan pasar.

Mochtar (1993) dalam Warya (2005) mengemukakan bahwa bentuk dan carapemberdayaan sangat beraneka ragam, mengacu pada konsep-konsep pemberdayaan petani kearah kemandirian dan ketangguhannya dalam berusahatani. Kondisi tersebut dapat ditumbuhkan melalui pendidikan/penyuluhan dalam membentuk perubahan perilaku, yakni meningkatkan kemampuan petani untuk dapat menentukan sendiri pilihannya, dan memberikan respons yang tepat terhadap berbagai perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya dan mendorong untuk lebih mandiri. Pemberdayaan petani-peternak ini penting karena dalam proses pembangunan pertanian, petani merupakan sumberdaya pembangunan yang berperan sebagai pelaku utam dalam mengembangkan usahatani.

Menurut Kartasmita (1996 : 9-10) upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, seperti penjelasan berikut. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan dalam wadah kelompok sebagai bentuk organisasi yang berakar di masyarakat. Organisasi tersebut merupakan satu sumber *power* (daya) yang penting, sehingga untuk pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali. Ini dikarenakan warga masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri, sehingga harus menggunakan pendekatan kelompok sebagai suatu organisasi yang mewadahi warga masyarakat untuk dapat berdaya. Di samping itu pendekatan kelompok adalah juga paling efektif dan dinilai dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Kartasasmita, 1996 : 10).

Menurut Hersupomo (dalam Wiati, 2002:16), birokrasi merupakan salah satu yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah.

Peranan pembuat kebijaksanaan dalam hal ini harus lebih bersifat menjadi fasilitator, bukan memberikan petunjuk dan aturan-aturan main tetapi lebih banyak menjadi fasilitator daripada regulator khususnya melalui terciptanya suasana partisipatif dari rakyat pedesaan dalam pembangunan daerah. Langkah ini menurut Soetrisno (1995:242-243) merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi dalam pembangunan.

Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah, khususnya pada bantuan ternak sapi bibit maka strategi dan proses pemberdayaannya praktis merupakan pengerahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat sehingga sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai ekonomis (Kartasasmita, 2001:7).

Menurut Abipraja (2002:21) pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup dengan hanya meningkatkan produktivitasnya, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamin pula adanya kerjasama dengan kemitraan yang erat antara masyarakat yang sementara berkembang. Dalam hubungan ini pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil, dan pengolahan surplus usaha.

Dijelaskan lagi oleh Kartasasmita (2001 :14), pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama, mudah diterima dan diayagunakan oleh masyarakat pelaksana dan pengelola (*acceptable*), kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); keempat, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan kelompok tani merupakan salah satu unsur penting dari pembangunan nasional terutama saat perekonomian Indonesia terpuruk akibat krisis ekonomi. Dalam konteks ini, membangun pedesaan berarti membangun potensi ekonomi dalam skala luas, karena 70 -80 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan sebagian besar penduduk desa miskin dan terbelakang. Dengan ciri umum yang ditandai struktur kegiatan berbasis agraris atau pertanian, kepadatan penduduk lebih jarang, cara hidup maupun pola budaya yang dekat dengan pemanfaatan sumber daya alam, tempat tinggal penduduk berkelompok tersebar, potensi tenaga dengan pendidikan yang baik, agak langka, dan mempunyai sistem organisasi sederhana berbasis kegiatan primer, dan lain-lain(Abipraja, 2002:45).

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005-2025. Selama ini pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Kedepan, agar dapat berperan sebagai kelompok tani yang partisipatif, maka pengembangan kelembagaan harus dirancang sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan kelompok tani itu sendiri sehingga menjadi mandiri dalam mendukung pembangunan kawasan agribisnis. Pembentukan dan pengembangan kelompok tani di setiap desa juga harus menggunakan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui prinsip pemberdayaan. Pendekatan yang

top-down planning menyebabkan partisipasi kelompok tani tidak tumbuh (Suradisastra, 2008; Syahyuti, 2007).

Pemberdayaan petani di pedesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan kelompok. Salah satu kelemahan yang mendasar adalah kegagalan pengembangan kelompok yang dimaksud, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai wadah untuk pemberdayaan kelompok tani secara hakiki (Syahyuti, 2003; Suradisastra, 2008).

Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal, dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa. Kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, areal pertanian, dan gender. Pengembangan kelompok tani diatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan petani dalam mengakses berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi (Saptana, dkk, 2004). Sedangkan menurut Suradisastra (2008), kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan vertikal.

Secara konseptual tiap kelembagaan petani yang dibentuk dapat memainkan peran tunggal ataupun ganda. Khusus untuk kegiatan ekonomi, terdapat banyak lembaga pedesaan yang diarahkan sebagai lembaga ekonomi, diantaranya adalah kelompok tani, koperasi dan kelompok usaha agribisnis. Secara konseptual masing-masing dapat menjalankan peran yang sama (tumpang tindih). Berdasarkan konsep sistem agribisnis, aktivitas pertanian pedesaan tidak

akan keluar dari upaya untuk menyediakan sarana produksi (benih, pupuk dan obat-obatan), permodalan usahatani, pemenuhan tenaga kerja, kegiatan berusaha tani (*on farm*), pemenuhan informasi dan teknologi serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (Syahyuti, 2008; Kasijadi, Suryadi dan Suwono, 2003).

Menurut Ismawan (2000:16) ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses pemberdayaan dalam kelompok swadaya masyarakat, yaitu : pertama, faktor internal yang meliputi anggota, pengurus, kegiatan dan mekanisme kerja; kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial-ekonomi, hubungan dengan pamong, program-program terpadu, dan ketiga adalah pendampingan.

Pertama, faktor internal kelompok : *Anggota* yaitu inti dari kelompok swadaya masyarakat adalah individu, salah satu prasyarat kemandirian kelompok swadaya adalah memadainya kualitas anggota. Kualitas dimaksud menyangkut hal-hal seperti keluasan wawasan, kedalaman pengetahuan, kematangan mental dan penguasaan keterampilan. *Pengurus* adalah motor penggerak kelompok karena mati hidupnya kelompok sering ditentukan oleh aktif tidaknya pengurus. Oleh karena itu kualitas pengurus harus ditingkatkan. Pengurus diharapkan memiliki komitmen yang tinggi, kemampuan manajerial yang memadai, wawasan yang terbuka, jaringan yang luas, dan kepemimpinan yang menonjol. *Kegiatan* merupakan hal yang sangat penting dalam memandirikan kelompok, tetapi kerap kali disepelekan, adalah memilih kegiatan yang tepat. Kegiatan yang dilaksanakan tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata anggota, melainkan semata untuk mengejar target kegiatan atau program kerja, sehingga meskipun berbagai bentuk kegiatan telah dilakukan tetapi kelompok tidak

menjadimandiri, bahkan ketergantungan anggota semakin besar. Untuk jangka panjang tidak akan mendapatkan dukungan dari anggota karena tidak termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas kelompok. *Mekanisme kerja* merupakan hal yang harus dimiliki suatu kelompok agar dapat mencapai tujuannya dengan efektif apabila memiliki kerja yang jelas. Mekanisme kerja pada awal kelompok harus disusun sesuai dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, dan praktik hidup anggota. Baru pada tahap selanjutnya diselaraskan dengan tingkat perkembangan anggota dan kompleksitas pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen.

Kedua, faktor eksternal kelompok : lingkungan sosial-ekonomi, lingkungan yang kondusif merupakan prasyarat kemandirian kelompok. Sikap saling tidak percaya dan saling curiga sebagai dampak dari krisis sosial politik yang lebih luas dapat menghancurkan fundamen kelompok, yaitu kepercayaan dan keterbukaan. *Hubungan dengan pamong*, harus bersifat luwes dalam arti tidak terdominasi atau terkooptasi oleh pamong tanpa harus berseberangan.

Ketiga, faktor pendampingan; masyarakat yang kurang berdaya pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan diri. Pengembangan tersebut memerlukan agen pengubah yang berperan untuk mendorong dan mengkoordinasikan perubahan. Di dalam program pemberdayaan masyarakat yang mempunyai fungsi relevan sebagai agen pengubah adalah pendamping/konsultan untuk membimbing warga masyarakat tersebut dalam upaya memperbaiki kesejahteraan maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan menghadapi dan menyesuaikan kegiatan dalam setiap perubahan

yang dihadapi baik secara kelompok, maupun individu. Dengan demikian pendampingan kelompok masyarakat menjadi penting, karena seringkali anggota kelompok terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan terbatas di bidang manajemen, pemasaran maupun teknologi. Namun demikian tidak jarang ditemui hal yang sebaliknya, dimana justru pendampinglah yang menjadi sebab ketidakmandirian kelompok yang dibinanya.

Pendamping menurut Ismawan (2000:19) adalah mitra dan fasilitator yang membantu kelompok swadaya masyarakat melaksanakan agenda-agenda dan mencapai tujuan. Hal yang sama berlaku dalam pemberdayaan kelompok tani seperti dikemukakan oleh Fatah *et al.* (2000:3), bahwa peran pendampingan yang dilakukan mencakup : (1) menciptakan suasana atau iklim kerja yang memungkinkan berkembangnya potensi petani/kelompok tani untuk dapat bertindak sesuai keadaan, kebutuhan dan prioritas mereka sendiri; (2) membantu petani/kelompok tani menemukan, mengembangkan dan memanfaatkan kemampuannya secara lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraannya, dan (3) mengembangkan potensi petani/kelompok tani dalam menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan dan kepeloporan dalam pembangunan pertanian pedesaan.

Fatah *et al.*, (2000:1) mengemukakan aspek pengelolaan dalam konteks pemberdayaan kelompok tani meliputi tahap identifikasi keadaan petani/kelompok tani, perencanaan kegiatan kelompok tani dan perencanaan pendampingan oleh penyuluh, pelaksanaan rencana-rencana tersebut, monitoring pelaksanaan rencana-rencana tersebut, dan evaluasi pelaksanaan rencana-rencana, serta perencanaan kembali tahun berikutnya. Proses penerapan ini merupakan

rangkaian tahapan atau daur masing-masing bagian saling berhubungan erat sebagai kerangka dasar bagi petani/kelompok tani dalam melakukan setiap program (kegiatan yang sifatnya dasar). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi, berdasarkan faktual, logis, dan operasional serta dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang dianggap oleh kelompok tani terkait (pendekatan partisipatif).

Secara operasional, penerapan strategi dan proses pemberdayaan kelompok tani harus selalu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kelompok tani yang bersangkutan. Sebagai kerangka pemikiran penerapan strategi dan proses pemberdayaan kelompok tani ini, ada empat elemen sistem yang merupakan kunci dan harus diperkuat secara proporsional, yaitu organisasi, usaha, modal dan jaringan kerja (Fatah et al., 2000,1:8). Kelompok tani sebagai kumpulan orang-orang atau petani yang menyangkut tentang keorganisasian kelompok, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan tempat bagi setiap anggota untuk mengaktualisasikan dirinya. Kedua, adalah kegiatan usaha tani, perlu dikelola secara efisien dan berorientasi agribisnis agar dapat memberikan keuntungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Ketiga, pengembangan dan pengelolaan usaha memerlukan dukungan modal yang cukup. Pengertian modal bukan hanya menyangkut tentang cara memperoleh modal, tetapi juga tentang pengelolaan modal agar dapat berkembang dan mencukupi kebutuhan usaha. Keempat, dalam rangka mengembangkan kelompok baik dalam organisasi, kegiatan usaha maupun

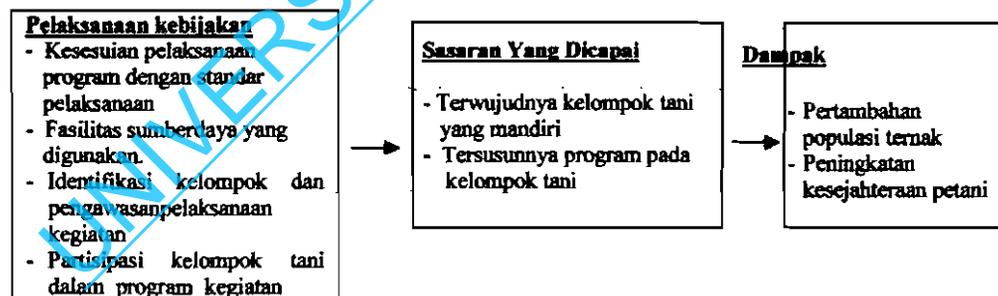
permodalan, maka diperlukan kerjasama yang kuat antara kelompok dengan pihak lain.

Bertitik tolak pada fokus permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka pemberdayaan kelompok tani sangat terkait erat dengan kemampuan penyediaan sumber daya manusianya, sumber dana maupun sumber sarana dalam mengelola kelompok dan sistem penyediaan sumber-sumber daya tersebut yang melingkupinya.

B. Kerangka Berpikir

Setelah mengkaji berbagai konsep di atas mengenai peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan kelompok tani dan konsep – konsep lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, maka secara deskriptif-kualitatif digambarkan keterkaitan konsep-konsep tersebut.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



C. Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi konseptual dan operasional pada penelitian adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan cara tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana meliputi penyusunan acara tertentu dan tindakan yang harus dijalankan misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati, patokan yang harus diadakan pada keputusan pelaksanaan dalam suatu jangka waktu tertentu.

Indikatornya adalah :

- Kesesuaian pelaksanaan program dengan standar pelaksanaan
- Fasilitas sumberdaya yang digunakan
- Identifikasi kelompok dan pengawasan pelaksanaan kegiatan
- Partisipasi kelompok tani dalam program kegiatan

2. Sasaran/hasil yang dicapai adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Indikatornya adalah :

- Terwujudnya kelompok tani yang mandiri
- Tersusunnya program pada kelompok tani

3. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas bisa bersifat alamiah, berupa kimia , fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. Adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.

Indikatornya adalah :

- Peningkatan populasi ternak
- Peningkatan kesejahteraan petani

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab pendahuluan, agar tujuan penelitian dapat dicapai maka diperlukan desain penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor sebagai solusi bagi permasalahan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan cara-cara analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif proses analisis data adalah proses mencari dan mengatur sistem transkrip interviu, catatan laporan dan bahan-bahan lain yang didapat sebagaimana dinyatakan oleh Bogdan dan Biklen (dalam Irawan, 2005). Data-data yang dihimpun, baik data primer maupun sekunder, selanjutnya disusun, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan logis sebagai hasil penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dan subjek penelitian adalah seluruh anggota Kelompok Tani Sipurenu dan Kelompok Tani Sinar Seimangkadu Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan sebanyak 27 orang yang mendapat bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) Tahun Anggaran 2004.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu sampelnya adalah mereka yang betul-betul paham tentang program bantuan ternak sapi bibit sehingga besarnya responden yang diambil adalah 27 orang. Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2013. Menurut Sugiyono (2009:96), Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau dengan kata lain orang yang ahli pada bidang itu, sehingga setiap pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan baik.

C. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan dan fokus masalah, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan. Informan adalah orang-orang yang dianggap terlibat langsung dalam program pendistribusian bantuan ternak sapi bibit. Menurut Moleong (2006:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan data tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang didapat karena informan dimanfaatkan untuk berbicara dan tukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Adapun informan yang dianggap mampu memberi informasi dan relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- * Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
- * Kepala Bidang Data dan Informasi

- * Kepala Bidang Peternakan
 - * Kepala Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak
 - * Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kelurahan Tanjung Harapan
 - * Ketua kelompok tani Sipurennu dan masyarakat sekitar lokasi penelitian
 - * Anggota kelompok tani dan masyarakat sekitar lokasi penelitian
- b. Peristiwa, yaitu kejadian dan kenyataan yang ada di lapangan baik yang terkait langsung maupun yang tidak langsung dengan topik dan permasalahan penelitian.
- c. Dokumen dan catatan yang ada relevansinya dengan permasalahan atau fokus penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dimana kelompok tani usaha peternakan yang mendapat Dana Bantuan Langsung Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan, Paket Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Pengembangan Ternak Sapi Potong) Tahun Anggaran 2004. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2013 yang sebelumnya telah dilakukan survey lokasi secara temporer pada bulan Mei 2013.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti namun setelah fokus penelitian menjadi jelas mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat digunakan untuk menjangkau data pada sumber data yang lebih luas dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi (Bogdan, 1972:3).

E. Prosedur Pengumpulan Data

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dirinci sebagai berikut .

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*). Dalam tahap ini mendatangi Kantor Camat Nunukan Selatan untuk melapor dan memberi penjelasan tentang maksud penelitian kepada Camat. Di samping itu, dilakukan pengumpulan berbagai informasi dari berbagai pihak terutama pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan program pemberdayaan di instansi terkait.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*getting along*)

Dalam tahap ini dilakukan pendekatan secara pribadi kepada informan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam. Selanjutnya dilakukan pengidentifikasian makna, pemahaman dan analisis informasi yang diperoleh dari berbagai informan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

3. Mengumpulkan Data (*logging the data*)

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga macam teknik, yaitu sebagai berikut :

- a) Wawancara mendalam (*in-dept interview*). Wawancara mendalam yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan terbuka dilakukan secara fleksibel menurut perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, dalam rangka menyerap informasi tentang persepsi, pandangan, pola pikir, pendapat maupun interpretasi terhadap masalah penelitian. Teknik ini dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan *interview guide*, maupun wawancara

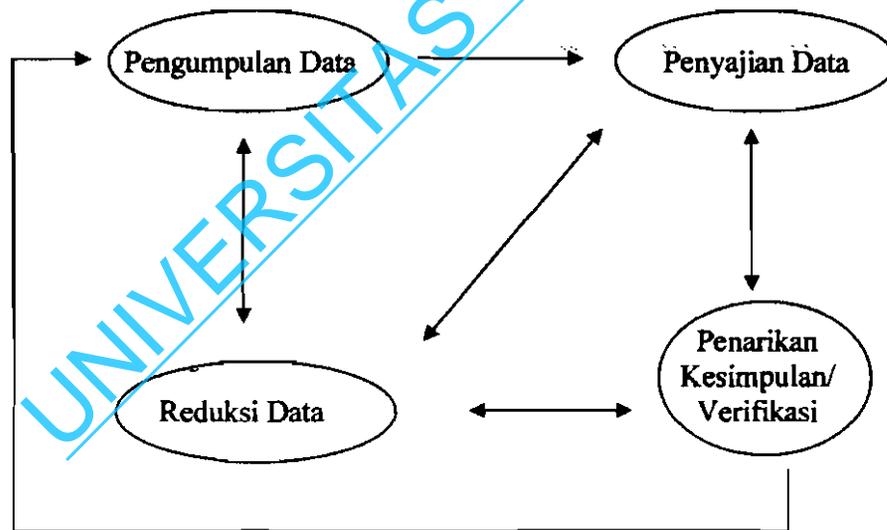
tidak terstruktur dalam arti dilakukan secara terbuka yang memberikan keleluasaan. Hasil wawancara dianggap sebagai *data primer*. Wawancara dilakukan terhadap *informan*, (Guba & Lincoln, 1981:160-170).

- b) Data sekunder. Data diperoleh dengan menyalin data yang ada pada dokumen-dokumen di kelompok tani, PPL dan instansi terkait seperti proposal pengusulan bantuan ternak sapi bibit, data laporan perkembangan populasi ternak (perkembangan populasi ternak kelompok tani Sipurennu), serta data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain berkaitan dengan penelitian seperti profil kelurahan, data tingkat pendidikan dan mata pencaharian anggota kelompok.
- c) Observasi. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap tanggapan, sikap, perilaku dan pemikiran dari kelompok sasaran terhadap kegiatan yang dilakukan kelompok dan upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pendamping maupun birokrasi dalam rangka pemberdayaan kelompok di lokasi penelitian.
- d) Kuesioner. Dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban dan kemudian dibagikan kepada sejumlah responden yang dianggap memahami tentang kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sapi bibit dan dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan petani.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung, bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data, kajian literatur dan pengambilan kesimpulan. Sebagaimana diterangkan oleh Sugiyono (2012), maka digunakan kerangka teoretik sebagai dasar pijakan untuk melakukan analisis dan memahami realitas yang diteliti secara alamiah. Prosedur analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), disebut sebagai ‘model interaktif,’ yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Model Interaktif Analisis Data



Sumber : Miles dan Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (1992 : 20)

Fase-fase analisis dalam penelitian ini dengan mengacu pada model interaktif di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan seluruh data yang didapat dalam suatu penelitian baik berupa dokumen, observasi maupun wawancara.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan bahwa semakin lama di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung sampai tersusunnya laporan yang lengkap dan terinci.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menyajikan data, kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dalam bentuk tabel dan grafik. Melalui penyajian data tersebut maka data diorganisasikan, disusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif atau kumpulan kalimat sebagai informasi yang tersusun guna memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dan

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Verifikasi sebagai kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan ‘inter subjektif,’ dengan kata lain makna yang muncul dari data kemudian diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (validasinya).

Pada penelitian ini, verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian. Verifikasi oleh peneliti dimaksudkan untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan, dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul, hipotesis dan kesimpulan secara tentatif, sehingga terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori.

Untuk mendapatkan kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, maka dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data penelitian menggunakan empat kriteria yang didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Moleong (2002:173-174), yaitu : a) derajat kepercayaan (*credibility*), b) keteralihan (*transferability*); c) kebergantungan (*dependability*); dan d) kepastian (*confirmability*).

Secara rinci keempat kriteria yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Derajat Kepercayaan

Derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validasi internal dari nonkualitatif. Untuk memeriksa derajat kepercayaan, teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagaimana dijelaskan berikut :

1) Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah instrumen itu sendiri, di dalam pengumpulan data, melakukan perpanjangan keikutsertaan untuk mengetahui latar penelitian sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Alasannya adalah, pertama, dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan dapat menguji ketidakebenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subjek. Kedua, dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri

2) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan peneliti dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

3) Triangulasi dalam arti mengadakan pengecekan melalui cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, fase penelitian dan waktu yang berlainan serta menggunakan metode lain.

4) Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kritik, pertanyaan yang tajam dan yang menantang tingkat kepercayaan akan kebenaran hasil penelitian.

5) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan penelitian pada atau hingga saat tertentu. Bila ditemukan kasus-kasus demikian maka peneliti melakukan penelitian lanjutan sampai semua kasus tuntas tercakup dalam kesimpulan yang dirumuskan. Proses ini berlangsung beberapa kali sampai dapat mengungkap semua kasus.

6) Kecukupan Referensial

Konsep ini sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Sebagai referensi untuk meningkatkan kepercayaan dan kebenaran data digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

7) Pengecekan Anggota

Pada akhir wawancara, peneliti mengecek ulang secara garis besar berbagai hal yang telah disampaikan oleh informan berdasarkan catatan lapangan, dengan maksud agar informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam menyusun laporan penelitian sesuai dengan makna yang dimaksud informan.

b. Keteralihan (*Transferbility*)

Pada kriteria ini peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan deskripsi tentang bagaimana hasil penelitian bisa dicapai. Apakah penelitian itu dapat diterapkan, akan diserahkan kepada para pembaca atau pemakai. Bila melihat dalam penelitian ada yang cocok bagi situasi yang dihadapinya, maka bisa memungkinkan terdapatnya keteralihan, meskipun dapat diduga, bahwa tidak ada dua situasi yang sama, sehingga masih perlu penyesuaian keadaan masing-masing. Hal ini disebabkan situasi yang berbeda dan tempat yang berbeda bisa terjadi keadaan yang tidak sama walaupun kasusnya sama. Oleh karena itu pemakai harus benar-benar memahami dan dapat memilih hasil penelitian yang relevan.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Jika nonkualitatif menekankan pada "orang," maka penelitian alamiah menghendaki agar penekanan bukan pada orangnya, melainkan pada data.

Dengan demikian kebergantungan ini bukan ini lagi terletak pada orangnya, melainkan pada datanya itu sendiri. Jadi isunya bukan lagi berkaitan dengan ciri penyidik, melainkan berkaitan dengan ciri-ciri data.

d. Kepastian (*Confirmability*)

Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, oleh karena itu untuk menjamin kebergantungan dan kepastian hasil penelitian, maka yang perlu dilakukan adalah memadukan kriteria kebergantungan dan kepastian.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, luas wilayah Kelurahan Tanjung Harapan adalah 10.701.46 ha dengan jumlah penduduk 2.209 jiwa terletak di Kecamatan Nunukan Selatan dengan luas wilayah adalah 17.479.04 ha, jumlah penduduk 11.271 jiwa terdiri dari laki-laki 6.148 jiwa dan perempuan 5.123 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk 1.54 jiwa/km² berada dipinggir pantai dengan ketinggian 2- 5 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 29° - 30° C. Kondisi umum batas wilayah Kecamatan Nunukan Selatan (Kelurahan Tanjung Harapan) adalah:

- sebelah utara berbatasan dengan : Kelurahan Selisun
- sebelah selatan berbatasan dengan : Laut Sulawesi
- sebelah barat berbatasan dengan : Kelurahan Mansapa
- sebelah timur berbatasan dengan : Selat Sebatik

Curah hujan di Kecamatan Nunukan Selatan (Kelurahan Tanjung Harapan) berkisar antara 2.244-4.848 mm per tahun dengan kondisi pH umum tanah antara 5-7. Sedangkan topografi wilayah antara 0-50 % dengan ketinggian antara 0-200 mdpl.

Jarak tempuh ke ibukota kecamatan adalah 1 km, ke ibukota kabupaten 22 km dan ke ibukota propinsi lewat transportasi darat selama 30 menit. Lokasi dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dengan kondisi jalan aspal dan pengerasan dan bisa juga ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama 1 jam. Dari jumlah penduduk tersebut

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani rumput laut dan peternak selebihnya adalah nelayan, pegawai negeri, wiraswasta.

Fasilitas umum yang dimiliki Kelurahan Tanjung Harapan terutama fasilitas pendidikan adalah 2 buah gedung sekolah dasar, 2 buah gedung sekolah lanjutan pertama dan 1 buah sekolah pendidikan anak usia dini sedangkan sekolah lanjutan atas berada di luar wilayah Kelurahan Tanjung Harapan, yaitu di Kelurahan Selisun. Angkutan umum hanya melewati jalan raya Nunukan-Tanjung Harapan sedangkan angkutan umum yang keluar masuk wilayah kelurahan secara reguler belum ada. Biasanya masyarakat menggunakan sepeda motor atau ojek untuk berbagai kepentingan ke pasar/keluar kelurahan, dan sebagian kecil menggunakan taksi.

Berdasarkan pengamatan selama penelitian dilapangan terdapat kesan bahwa masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan cukup terbuka untuk beradaptasi dengan masyarakat luar sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dalam kesehariannya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia, karena penduduk kelurahan ini pada umumnya terdiri dari suku Bugis.

B. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Ternak Sapi Bibit untuk Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Tanjung Harapan

1. Program diimplementasi sesuai dengan program yang ada

Program bantuan kepada petani disesuaikan dengan rencana strategis yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dan diselaraskan program pembangunan pertanian dari Departemen Pertanian Republik Indonesia melalui Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) Tahun Anggaran 2004. Program utamanya adalah pemberdayaan petani dan pengembangan agribisnis di pedesaan untuk kesejahteraan petani dengan menggunakan pendekatan usaha kelompok dalam skala usaha ekonomis dan menerapkan manajemen yang memadai sebagaimana tertuang dalam Pedoman Umum Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2004 (Pedum PPAP). Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan berupa ternak sapi bibit yang diadakan langsung oleh kelompok tani tanpa pihak ketiga dengan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004, pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani, yang bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas dan akhirnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan peternak.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmadi (2012) yang menyatakan bahwa pembentukan kelompok petani ternak merupakan salah satu solusi yang tepat dalam meningkatkan pemberdayaan usaha peternakan rakyat di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota.

Berbagai aspek dalam usaha peternakan seperti pengadaan sarana produksi (bibit dan pakan), pencegahan penyakit ternak dan akses pemasaran dapat dilakukan secara berkelompok dan bergotong royong, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan dan pendapatan usaha. Untuk lebih meningkatkan keberdayaan kelompok petani peternak ini memang membutuhkan uluran tangan dari beberapa instansi dan dinas terkait. Pendekatan dimaksud adalah dengan memberikan bantuan sapi bibit untuk kelompok yang didistribusikan langsung kepada masing-masing anggota kelompok dan dikelola secara terorganisasi dengan mekanisme, cara, bentuk ikatan dan pengembalian dalam waktu tertentu.

Usaha kelompok menurut dokumen Pedum PPAP adalah segala jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Jenis usaha tersebut sangat luas mulai usaha agribisnis sebagai unit usaha pokoknya hingga jenis usaha komersil lain yang tidak langsung berkaitan dengan usaha tani, seperti unit usaha simpan pinjam, jasa/usaha pengolahan dan pemasaran rumput laut sesuai kebutuhan anggotanya dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Demi kelancaran dan kecepatan pelaksanaan program/proyek ini diadakan fasilitasi secara organisasi struktural. Di tingkat pusat, sebagai penanggung jawab program adalah Menteri Pertanian dibantu oleh tim pembina dan tim asistensi. Untuk tingkat propinsi dibentuk tim pembina propinsi, dan untuk tingkat kabupaten dibentuk tim teknis kabupaten. Di tingkat lapangan, fasilitasi dilakukan oleh penyuluh sebagai ujung tombak pelayanan dan pembinaan bagi petani.

Kegiatan program pemberdayaan kelompok ini tersusun dalam kegiatan-kegiatan Proyek PPAP Tahun Anggaran 2004, yaitu :

a. Penyusunan Rencana Teknis meliputi :

Perencanaan teknis operasional di tingkat pusat dilaksanakan secara koordinatif lintas subsektor dan lintas sektor oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang hasil antara lain dituangkan dalam Pedoman Umum (Pedum) Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP).

Perencanaan teknis operasional dilaksanakan di tingkat kabupaten dalam rangka menjamin keterkaitan dan keharmonisan antara kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seluruh sumber daya kegiatan dimanfaatkan untuk memfasilitasi kelancaran pemberdayaan kelompok tani agar lebih maju dan sejahtera dengan manajemen yang tepat guna dan tepat sasaran. Hasil perencanaan teknis operasional di kabupaten antara lain adalah Petunjuk Teknis (Juknis), desain operasional dan rencana pembinaan Proyek Pemberdayaan Petani dan Agribisnis di Pedesaan tingkat kabupaten.

Tugas pokok tim teknis kabupaten yang berkaitan langsung dengan pembinaan kelompok adalah memfasilitasi dan pembinaan teknis produksi, manajemen usaha tani dan pengembangan kelembagaan kelompok.

Seleksi calon peserta dilakukan berdasarkan kriteria kelompok yang sudah ada/berpengalaman dan terampil/mampu memelihara pejantan unggul/pemacek untuk usaha pelayanan kawin alam maupun dengan teknologi inseminasi buatan. berada pada kawasan sentra ternak sapi dengan pemeliharaan ekstensif dan semi

intensif, tersedia sumberdaya pakan hijauan pakan ternak dan tenaga pelayanan kesehatan hewan dan setiap kelompok terdiri dari 15 - 30 anggota.

Legalisasi penetapan kelompok, yaitu penetapan kelompok yang terpilih berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Teknis Proyek PPAP Kabupaten Nunukan Nomor : 524/P.02/TT.PPAP/V/2004 Tanggal 18 Mei 2004 tentang Usulan Penetapan Kelompok Sasaran Proyek PPAP Tahun Anggaran 2004, Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004 Nomor : 524/24/SK/PPAP/V/2004 Tanggal 27 Mei 2004 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Ternak Peserta Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004 dan disahkan oleh Bupati Nunukan Nomor : 366 Tahun 2004 Tanggal 28 Juni 2004 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Ternak Peserta Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004 sebagai kelompok sasaran proyek (surat penetapan kelompok satu berkas disampaikan ke KPKN kabupaten setempat). Sosialisasi program/proyek kepada kelompok secara detail dengan menjelaskan aturan, hak dan kewajiban kelompok/anggota serta sanksi-sanksinya.

b. Bantuan Usaha Pengembangan Sapi Potong (Sapi Bibit)

Bantuan Usaha Pengembangan Sapi Potong diperuntukkan bagi kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa sapi bibit untuk kelompok yang terpilih antara lain bagi kelompok agribisnis peternakan. Bibit sapi yang didistribusikan tersebut masih memerlukan penggalan partisipasi anggota untuk mengelolah dalam hal peningkatan populasi dan produktivitas didasarkan pada

kepentingan kelompok melalui kesepakatan anggota kelompok. Anggota kelompok yang menerima harus mampu menggulirkan /mengembalikan anak ternak sapi seumur yang diterima awal dan digulirkan setelah 5 tahun atau sebelumnya kepada kelompok untuk disalurkan kepada anggota lain yang belum menerima.

Usaha peningkatan kesejahteraan petani dikhususkan untuk peternak yang sudah mapan dalam mengelola kelompok tani berupa pengembangan usaha peternakan sapi bibit, perbaikan kandang dan peralatan peternakan, pengelolaan pakan ternak, pelayanan kesehatan hewan dan lain-lain keperluan yang dibutuhkan kelompok. Teknis operasional dibantu tim teknis kabupaten yang mengacu pada Juknis Operasional.

2. Fasilitas Sumberdaya Yang Digunakan

Perkembangan kelompok sejak dibentuk dan mendapat bantuan penguatan modal kelompok hingga dilakukannya penelitian ini dapat dilihat pada keterangan berikut. Kelompok tani usaha agribisnis peternakan Sipurennu beranggotakan dua puluh tujuh orang, dengan kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Berdasarkan pendidikannya maka anggota terdiri dari 20 orang berpendidikan SD, 3 orang berpendidikan SLTP, 3 berpendidikan SLTA dan 1 orang berpendidikan Sarjana Muda. Koentjaraningrat (1993), mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal merupakan penyebab responden kurang adaptif terhadap modernisasi, selain itu sifat disiplin yang rendah serta sifat mengabaikan tanggungjawab merupakan salah satu karakteristik masyarakat pedesaan. Mereka cenderung mempertahankan pola-pola yang sudah ada, tawaran

terhadap suatu perubahan dianggap sebagai suatu hal yang belum pasti dan mengandung resiko. Hal ini dipertegas kembali oleh Gould dan Saupe (1989) bahwa menganalisis umur, pendidikan, dan pelatihan merupakan variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam *off-farm*, pekerjaan usaha tani dan rumah tangga. Pelatihan termasuk pula penyuluhan bertujuan mengubah perilaku sumber daya petani temak ke arah yang lebih baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Formal Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurenu Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

No.	Nama Anggota	Umur (Tahun)	Pendidikan	Status dalam Kelompok
1.	Mar	45	Sarjana Muda	Ketua
2.	AS	41	SD	Sekretaris
3.	Her	43	SD	Bendahara
4.	BC	40	SD	Anggota
5.	PA	43	SD	Anggota
6.	Pw	42	SD	Anggota
7.	ST	55	SMP	Anggota
8.	Ar	54	SMA	Anggota
9.	Jai	56	SD	Anggota
10.	Ram	40	SD	Anggota
11.	BO	43	SMP	Anggota
12.	Ar	42	SD	Anggota
13.	MN	54	SD	Anggota
14.	MA	53	SD	Anggota
15.	AW	44	SD	Anggota
16.	MT	52	SD	Anggota
17.	NU	41	SD	Anggota
18.	MS	51	SD	Anggota
19.	MP	54	SMA	Anggota
20.	Ham	39	SD	Anggota
21.	Sud	45	SD	Anggota
22.	UK	43	SD	Anggota
26.	Bh	44	SMA	Anggota
27.	UK	46	SD	Anggota

Sumber : Informan, diolah 2013

Pemberdayaan kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu difasilitasi atau dipandu oleh seorang tenaga pendamping dari PPL Kelurahan Tanjung Harapan. Dalam program pemberdayaan ini, PPL bertugas sebagai fasilitator yang mendampingi kelompok tani dalam melakukan berbagai kegiatan dan proses pemberdayaan di lapangan misalnya memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan SDM bagi anggota kelompok seperti yang dijelaskan pada Tabel 2. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hardiyanto (2007), bahwa pemberdayaan petani peternak dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman baik melalui penyuluhan maupun komunikasi antar-peternak agar mereka mampu memperbaiki sistem pengelolaan usaha peternakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contoh bentuk pemberdayaan petani peternak ialah mengikutsertakan petani dalam pengambilan keputusan mengenai program pemerintah yang akan dijalankan menyangkut masalah peningkatan produktivitas peternakan seperti, mengajarkan peternak proses inseminasi buatan (IB), pengolahan sumber daya lokal (sisa hasil pertanian) sebagai bahan pakan berkualitas, pelatihan pemanfaatan sisa hasil peternakan menjadi pupuk dan sebagainya.

Tabel 2. Jenis Pelatihan Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, (Sumber : Informan, diolah 2013).

No.	Materi Pelatihan	Jumlah Peserta	Lama Pelatihan	Lembaga Penyelenggara
1.	Pembuatan pakan (hay, silase)	27 orang	8 jam	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

2.	Pembuatan kompos dari kotoran ternak	27 orang	8 jam	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan
3.	Pelatihan kesehatan hewan	1 orang	3 hari	Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur
4.	Pelatihan Inseminasi Buatan	2 orang	21 hari	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang Jawa Timur
5.	Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	2 orang	14 hari	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang Jawa Timur

3. Identifikasi Kelompok dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan

a. Identifikasi kelompok

Dalam proses persiapan dan pelaksanaannya tidak melibatkan kelompok sasaran, karena justru identifikasi dilakukan untuk memilih anggota-anggota kelompok yang akan menjadi kelompok sasaran. Petani hanya berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelaksana proyek dan PPL, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi cara kerja, dimana temuan-temuan dari hasil identifikasi tidak diumumkan atau diuji ketepatannya.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pemberdayaan untuk kesejahteraan petani, proses identifikasi dan analisis masalah secara partisipatif merupakan tahap awal pengembangan kemandirian kelompok yang seharusnya dilakukan oleh kelompok. Karena hasil dari identifikasi dan analisis masalah akan menjadi acuan bagi kelompok dalam menyusun rencana atau pada tahap perencanaan. Dengan melakukan identifikasi, kelompok akan mengetahui realitas keadaan kelompok tani (atau potret kelompok) pada saat tersebut, berupa permasalahan

yang dihadapi, kemampuan atau potensi dan kebutuhan atau harapan yang diinginkan di masa mendatang sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditentukan. Dalam kegiatan ini proses transformasi pengetahuan dan pembelajaran perlunya identifikasi dan analisis masalah bagi kelompok belum berjalan. Dorongan dan kemampuan dari pendamping sangat dibutuhkan dalam hal ini, untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan kelompok agar dapat melaksanakan proses identifikasi dan analisis masalahnya dengan baik.

Kelurahan Tanjung Harapan dipilih karena masyarakat kelurahan ini masih jarang yang memiliki ternak sapi, sedangkan potensi lahan dan pakan sangat mendukung, namun daerah tersebut belum bisa dikatakan sebagai swasembada daging karena belum bisa memenuhi kebutuhan akan daging sapi didalam daerah sendiri dan untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melakukan impor daging sapi dari negara negara India yang melalui Negara Malaysia. Sejak pemberian bantuan sapi bibit Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada tahun 2004 sebanyak 59 ekor yang terdiri dari 5 ekor jantan dan 54 ekor betina, ternak sapi di Kelurahan Tanjung Harapan telah berkembang dengan cukup baik, dengan jumlah ternak saat ini adalah 396 ekor terdiri dari jantan 174 ekor dan betina 222 ekor, selain ternak yang sudah digulirkan kepada salah satu kelompok tani yaitu Sipurio. Walaupun dari segi jumlah terjadi perkembangan dan penambahan populasi, namun secara genetik terjadi penurunan kualitas karena terjadinya *inbreeding* (perkawinan antar satu keturunan) yang tinggi sehingga hasil keturunannya memiliki pertumbuhan badan yang kecil. Dengan memperhatikan sistem pemeliharaan ternak, yaitu semi-intensif yang umumnya

dilakukan petani ternak di wilayah ini, maka diperlukan introduksi sapi pejantan unggul dari luar disamping pelayanan inseminasi buatan untuk memperbaiki keturunan ternak-ternak sapi di wilayah Kelurahan Tanjung Harapan.

Kelompok tani yang diseleksi sebagai calon peserta dan calon lokasi adalah kelompok tani yang telah menyampaikan proposal pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Untuk memenuhi kriteria yang ada di Pedum, pelaksana proyek melakukan inventarisasi dan identifikasi petani calon peserta (CP) dan calon lokasi (CL) yang dilaksanakan oleh Tim Kabupaten dengan menyebarkan blanko identifikasi dan seleksi calon peserta dan calon lokasi. Identifikasi dan seleksi di lapangan dilakukan oleh Tim Verifikasi dari pusat dan propinsi dibantu oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) Kelurahan Tanjung Harapan (Bam Subagio, SP). Pertama-tama yang dilakukan PPL adalah melakukan pengamatan terhadap calon peserta, dipilih mereka yang menurut pengamatan PPL mudah diajak bekerja sama dalam hal penyiapan kandang dan kebun hijauan pakan ternak, kemudian meminta saran kepada tokoh peternak setempat (Bapak Mar) yang dianggap sangat mengetahui perilaku anggota-anggota kelompok ternak yang ada, kemudian calon peserta harus petani yang memiliki kemauan dan telaten dalam memelihara ternaknya dan memiliki kebun hijauan makanan ternak. Kemudian ditetapkan calon-calon penerima yang menjadi peserta selanjutnya mengisi blanko. Jumlah yang terpilih sebanyak 27 orang sesuai dengan jumlah yang disarankan dalam dokumen Pedum yaitu minimal 20 orang. Dan setelah hasil verifikasi dinilai oleh tim maka kelompok

tani Sipurennu ditetapkan sebagai kelompok calon penerima, kemudian dilakukan legalisasi dengan Penetapan Surat Keputusan Bupati .

b. Sosialisasi

Sosialisasi program/proyek terhadap kelompok sasaran dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi kelompok dalam pengembangan usaha serta pencerahan tentang tugas dan fungsi, hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek (penyuluh, pengurus kelompok, tokoh masyarakat, dan sebagainya).

Sosialisasi kepada kelompok adalah menjelaskan secara detail aturan, hak dan kewajiban kelompok/anggota serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku, disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dan aspirasi dari semua pihak. Kegiatan ini dilakukan sebanyak dua kali pada pertengahan Agustus 2004 oleh pelaksana proyek, yaitu pimpinan bagian proyek dan penanggungjawab di propinsi serta tenaga pendamping di lapangan yaitu PPL (Bam) dan dihadiri Lurah Nunukan Selatan (Ar).

Pada pertemuan tersebut dijelaskan tentang pola pendistribusian bibit ternak melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu sebanyak 59 ekor ternak sapi bibit terdiri dari 5 ekor jantan dan 54 ekor betina, dimana tiap anggota kelompok mendapat 2 ekor/kepala keluarga sedangkan ternak jantan dipakai secara bersama dan bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani Sipurennu, kemudian pada bulan Maret 2007 dilakukan sosialisasi program pola

pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dilakukan perubahan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana setiap anggota kelompok tani mendapat 5 ekor bibit ternak sapi yaitu 3 ekor jantan untuk penggemukan dan 2 ekor betina untuk dikembangbiakkan. Sebagai bahan perbandingan efektivitas bantuan ternak sapi bibit yang diberikan, maka disajikan data kelompok tani penerima bantuan tahun 2002 sebanyak 27 orang dimana setiap anggota kelompok tani mendapat 1 ekor betina untuk dikembangbiakkan, bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani Sinar Seimengkadu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. Selain itu kelompok tani Sipurennu penerima bantuan tersebut memperoleh dana penguatan modal untuk perbaikan kandang dan peralatan peternakan sebesar Rp. 5.400.000, pengadaan hijauan pakan ternak sebesar Rp. 10.250.000, pelayanan kesehatan hewan sebesar Rp. 9.500.000 dan keperluan lain yang dibutuhkan kelompok yang tercakup didalam Rencana Usaha Kelompok (RUK).

RUK kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh ketua kelompok, penyuluh dan salah seorang anggota kelompok dan diusulkan kepada pimpinan bagian proyek di kabupaten. Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524/10/SPP/PPAP/VII/2004 Tanggal 15 Juli 2004. Dana tersebut akan dipindahbukukan ke rekening Kelompok Tani Sipurennu pada Bank Negara Indonesia Kalimantan Timur Cabang Nunukan di Nunukan.

Pengelolaan bantuan ternak sapi bibit menurut dokumen Pedoman Umum Proyek PPAP Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004 dinyatakan bahwa

ketentuan pengelolaan dan pengembangan tenak bibit yang diperoleh masing-masing anggota kelompok dilaksanakan sendiri oleh kelompok secara langsung tanpa tender dan tidak ada intervensi dari pihak ketiga. Pengadaan dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sama dengan produk yang diusulkan oleh kelompok. Penyaluran sarana produksi (bibit ternak sapi potong) dan sarana lainnya dari kelompok kepada anggota dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

Untuk pengadministrasian kelompok terlebih dahulu disepakati mekanisme yang akan diterapkan untuk menghimpun hasil perguliran ternak/pengembalian dari anggota. Selanjutnya ditentukan calon penerima perguliran ternak untuk membentuk kelompok bayangan, selanjutnya ditentukan pengurus atau koordinator pengelola. Ternak yang berasal dari hasil perguliran/pengembalian anggota dikelola oleh kelompok bersangkutan yang baru dibentuk sesuai prosedur dan aturan yang disepakati bersama.

Hasil dari kesepakatan kelompok dibuat surat perjanjian bersegel anggota dengan kelompok yang berisi tentang tata cara pengembalian, jangka waktu pelunasan yang harus dipenuhi anggota kelompok penerima bantuan. Disepakati bahwa masing-masing anggota mendapatkan 2 ekor bibit ternak dan dilakukan perguliran dalam kelompok bagi anggota yang belum mendapat bantuan dalam jangka waktu 5 tahun sesuai prosedur yang tercantum perjanjian kontrak kerjasama, dan apabila ternak yang dipelihara tersebut tidak mampu berkembangbiak atau tidak bisa berproduksi, maka ternak tersebut dapat dijual, dan hasil penjualan dapat digunakan untuk membeli bibit ternak sapi yang lebih

produktif , begitu juga apabila ternak yang dipelihara mati tanpa disengaja atau karena penyakit, maka anggota penerima bantuan tersebut wajib melapor ke instansi terkait yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan atau di Bidang Budidaya dan Sumber Daya Ternak untuk segera ditindaklanjuti.

Ternak hasil perguliran yang telah terkumpul dan telah didata pada tahun itu akan digulirkan kepada anggota yang belum menerima. Hingga data terakhir diambil jumlah ternak yang digulirkan dalam kelompok tani Sipurennu kurun waktu 2004-2012 sebanyak 396 ekor terdiri dari jantan 174 ekor dan betina 222 ekor, ternak hasil perguliran selanjutnya dikelola oleh kelompok baru yang sudah dibentuk yang dinamakan kelompok tani Sipurio.

Secara umum pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004, sudah mampu mensejahterahkan masyarakat petani khususnya di kelompok tani Sipurennu dan telah mengacu kepada petunjuk-petunjuk yang ada, serta melibatkan orang banyak secara transparan baik Pedoman Umum yang diterbitkan Pusat, Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis Operasional. Kegiatan utama proyek ini adalah berupa Penyaluran Dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam hal ini pola pengelolaannya dilakukan dengan mendatangkan ternak sapi bibit dari luar daerah yang dianggap memenuhi persyaratan. Pengadaan sapi bibit tersebut didistribusikan langsung kepada anggota kelompok tani penerima melalui mekanisme BLM yang diterapkan pemerintah. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan program pemberdayaan kelompok tani usaha agribisnis

peternakan Sipurennu di Kelurahan Tanjung Harapan dilihat dari kinerja prosedur pelaksanaan dan administrasi proyek, yaitu realisasi kelompok sasaran, penyebaran bibit ternak kepada anggota kelompok telah terlaksana sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh dinas terkait.

Menurut Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011) dari hasil pelaksanaan pengembangan peternakan dengan pola BLM ini secara nasional merupakan pola yang lebih baik dari pola-pola sebelumnya yang diterapkan seperti pemberian input fisik, dimana kelompok hanya menerima ternak, mengelola usaha kelompok maupun menentukan jalannya usaha tersebut secara mandiri. Namun menurut hemat penulis apa yang diterapkan pada kelompok tani Sipurennu saat ini hampir sama saja dengan cara-cara lama berupa pemberian input fisik hanya dengan jalan yang berbeda karena dari awal, kelompok sudah diintervensi dalam penentuan pemanfaatan dana BLM dalam bentuk paket-paket berorientasi komoditas tertentu seperti paket bantuan ternak sapi potong yang diharuskan membeli sapi bibit sebagai upaya pemberdayaan petani agar dalam kehidupannya bisa lebih mapan dan sejahtera. Walaupun RUK diserahkan kepada kelompok untuk membuatnya, namun karena penggunaan dana diharuskan untuk membeli komoditas tertentu seperti biaya pembuatan dan perbaikan kandang, perluasan hijauan pakan ternak serta biaya penanganan kesehatan hewan, maka input RUK yang dibuat hanya sekedar untuk memenuhi target program.

Semestinya penggunaan dana BLM ini dapat lebih fleksibel tidak tergantung komoditas asalkan tetap untuk hal-hal produktif masih berkaitan dengan peningkatan produk dan produktivitas ternak. Kelompok semestinya diberi wewenang lebih besar untuk memilih dan menentukan arah serta jenis kegiatan utama mereka. Pemerintah dalam hal ini sebatas memberikan alternatif-alternatif terbaik dengan berbagai analisis usaha, resiko maupun untung-ruginya. Disinilah pentingnya petani ternak terpilih dan PPL yang ditunjuk sebagai pendamping diberi pembekalan dan pelatihan sebagai awal pelaksanaan program.

Secara sosial ekonomi dan kelembagaan, kelompok tani usaha agribisnis peternakan Sipurenu sudah terbina dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan petani peternak, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya populasi ternak dan adanya pembentukan kelompok baru yang akan mengelola ternak hasil perguliran.

1. Kriteria Kelompok, Lokasi dan Kompetensi

a. Kelompok

- Kelompok telah terdaftar dan merupakan binaan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten Kota;
- Kelompok telah mengembangkan usaha budidaya ternak potong (sapi potong/kerbau/kambing-domba) atau kelompok baru, namun potensial baik SDA maupun SDM pengembangan usaha budidaya ternak potong;
- Mempunyai lahan/sarana yang layak untuk pengembangan usaha budidaya ternak potong;

- Mempunyai kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT), baik milik kelompok maupun perseorangan;
- Mempunyai struktur organisasi yang jelas (identitas kelompok, pengurus dan anggota);
- Pengurus kelompok termasuk anggotanya, diantaranya bukan berasal dari kerabat dekat (misalnya Ketua kelompok dan bendahara merupakan keluarga terdekat);
- Pengurus dan anggota kelompok profesinya adalah petani peternak, bukan PNS, Polisi, TNI atau Pengusaha;
- Mempunyai kelengkapan administrasi kelompok;
- Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Tim Teknis/Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota;
- Membuat proposal usaha sesuai dengan komoditi yang ingin dikembangkan (sapi potong/kerbau/kambing-domba) dan direkomendasi oleh Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota.

b. Lokasi

- Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan jenis ternak potong yang akan dikembangkan, seperti ketersediaan sumber pakan lokal dan sumber air;
- Merupakan lokasi yang diarahkan untuk pengembangan kawasan/sentra produksi peternakan;

- Mempunyai potensi untuk dikembangkan, dilihat dari aspek teknis, sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
- Lokasi dan sekitarnya bebas dari penyakit hewan menular;
- Mudah diakses dalam pemberian pelayanan dan pendampingan teknis, akses informasi dan pasar.

c. Kompetensi

- Mempunyai kompetensi untuk menerima dan mengembangkan inovasi dan IPTEK;
- Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang budidaya ternak potong (sapi potong/kerbau/kambing-domba);
- Mempunyai tanggungjawab terhadap keberhasilan program/kegiatan
- Mampu untuk mengembangkan koordinasi yang baik dengan Petugas Pendamping/PPL, Aparat Desa/Kelurahan, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Kelompok Tani/Petani Peternak disekitarnya.

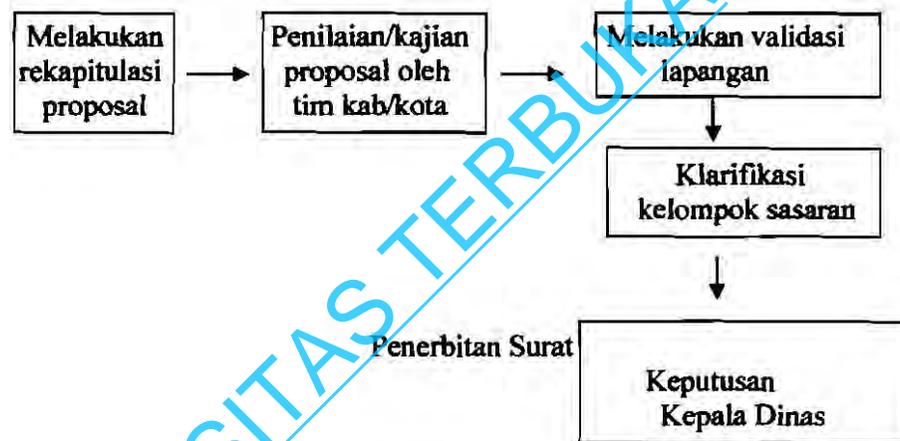
2. Seleksi dan Validasi Lapangan

Kelompok ternak yang mengajukan proposal dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota, adalah merupakan kelompok sasaran yang dapat diproses untuk mengikuti proses seleksi dan validasi lapangan, merupakan dasar dalam penetapan kelompok terpilih untuk ditetapkan sebagai penerima dana fasilitasi dan pemberdayaan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).

3. Pelaksanaan Seleksi

Seleksi dan validasi kelompok sasaran, dilaksanakan dengan mengacu pada kriteria Kelompok, Lokasi dan Kompetensi, dengan prosedur pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan Seleksi dan Validasi Kelompok Sasaran



4. Rencana Usaha, Pencairan dan Penggunaan Dana

a. Rencana Usaha Kelompok

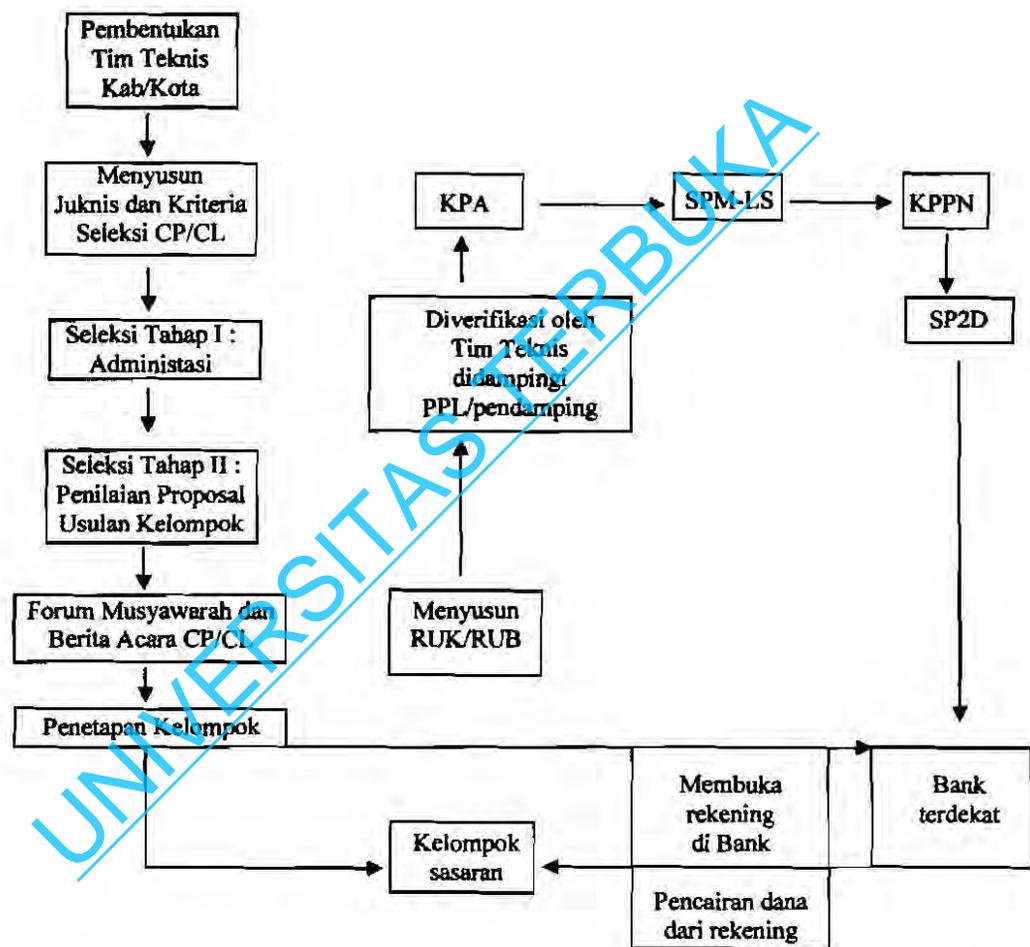
Dalam rangka proses pencairan dana, dipersyaratkan adanya Rencana Usaha Kelompok (RUK). Rencana Usaha Kelompok yang disusun berisi rencana kegiatan dan rincian biaya yang diperlukan perkegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok. RUK tersebut harus ditandatangani Ketua Kelompok dan diketahui oleh Petugas Pendamping dan Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.

b. Tata Cara Pencairan Dana

Tata cara pencairan dana mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Tahun 2004 tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Penguatan Modal Kepada Kelompok Sasaran Penerima PMUK, Surat Penetapan Menteri Keuangan tentang Penetapan Daftar Isian Proyek Nomor SP-DIP 079/XVIII/016/2004 Tanggal 1 Januari 2004 (yang berlaku sebagai SKO), Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 821.2/370/TU/2004 Tanggal 8 April 2004 tentang Pengangkatan Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004, Petunjuk Operasional (PO) Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004, Surat Tim Teknis Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004 Nomor 524/P.01/TT-PPAP/V/2004 Tanggal 17 Mei 2004 tentang Berita Acara Hasil Musyawarah Tim Teknis Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004.

Prosedur pencairan dana penguatan modal usaha kelompok peternak dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Mekanisme Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Peternak dan Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) atau Rencana Usaha Bersama (RUB)



Sumber : Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bansos Ditjen Peternakan

c. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usahanya secara berkelanjutan, disamping itu pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam memberikan pembinaan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Juga pengawasan kegiatan dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu camat, kepala desa dan juga penyuluh lapangan. Monitoring dan evaluasi yaitu kegiatan fasilitasi yang dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan usaha dan kelembagaannya serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari pusat, kabupaten/kota.

4. Partisipasi Kelompok Tani Dalam Program

Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dasar pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan untuk menjadi lebih baik. Adapun inti proses pemberdayaan masyarakat ini adalah partisipasi sehingga melalui tahapan-tahapan pemberdayaan partisipatif

akan timbul suatu kemandirian dalam masyarakat untuk mau mengembangkan dan melestarikan hasil-hasil suatu kegiatan proyek/program.

Sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem solving capacity*) dan pemberdayaan (*empowerment*) kelompok tani, maka penerapan pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif selama pendampingan sangat strategis, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, permasalahan dan potensi sampai dengan pengambilan keputusan dan perumusan tujuan dalam upaya menciptakan iklim yang mendukung munculnya partisipasi, sehingga petani yang dibina tumbuh motivasinya untuk berperan serta di dalam berbagai kegiatan program pembangunan pertanian. Ada kaitan yang erat antara partisipasi dan insentif. Insentif adalah manfaat yang dapat diperoleh dari partisipasi. Tanpa suatu insentif maka partisipasi berubah makna dari suatu keinginan manusia untuk secara sukarela ikut dalam suatu kegiatan yang dianggapnya dapat memperbaiki harkat hidup masyarakat dan dirinya sendiri, menjadi suatu tindakan paksaan. Apabila ini terjadi, maka akibat yang terjadi adalah mobilisasi, sesuatu yang sangat berbeda dengan falsafah dan pengertian yang terkandung dalam konsep partisipasi. Dengan kata lain menganjurkan masyarakat berpartisipasi tanpa insentif berarti sama dengan menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek.

Partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan ekonomi saat ini bukan lagi merupakan masalah mau atau tidaknya mereka ikut berpartisipasi, melainkan lebih pada sejauh mana mereka melalui partisipasi tersebut dapat memperoleh manfaat bagi perbaikan kehidupan sosial, ekonomi dan pada

akhirnya mengarah pada kesejahteraan petani. Secara individual, partisipasi petani peternak di kelurahan Tanjung Harapan bila diukur dari kemauan mereka untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek/program, sebenarnya hal ini telah mereka lakukan. Yaitu bagaimana mereka dapat mengembangkan ternak bantuan jenis sapi Bali yang diberikan melalui PPAP tahun 2004 dari jumlah awal sebesar 59 ekor yaitu 5 ekor jantan, 54 ekor betina dan meningkat populasinya menjadi 396 ekor yaitu 174 ekor jantan, 222 ekor betina dan menjadikan Kelurahan Tanjung Harapan termasuk kecamatan Sebuku, Seimanggaris dan Sebatik sebagai salah satu kantong ternak sapi Bali bagi Kabupaten Nunukan.

Kemauan untuk mengembangkan ternaknya ini menurut hemat penulis didorong oleh kesadaran mereka akan besarnya manfaat yang bisa mereka terima selama memelihara ternaknya baik secara komersial maupun semi komersial/cabang usaha pokok. Informasi yang mereka berikan tentang alasan mereka beternak adalah dengan beternak mereka bisa menambah pendapatan sehingga bisa memperbaiki ekonomi keluarga keluarga seperti biaya pendidikan anak sekolah, biaya perbaikan rumah maupun untuk keperluan lain yang memerlukan dana besar dan mendadak.

Bila ditelusuri lebih jauh maka kemauan untuk mengembangkan ternaknya, pada awalnya adalah didorong oleh kemudahan dalam memelihara ternak sapi Bali. Tanpa memerlukan biaya tinggi, banyak tenaga dan waktu maupun teknologi yang tepat guna, dengan melakukan sistem beternak semi ekstensif-ekstensif, ternak sapi Bali dapat berkembangbiak dengan baik karena

karakteristik sapi Bali yang memiliki kesuburan yang tinggi dibanding sapi PO atau atau lainnya. Memelihara ternak dengan cara yang mudah, biaya rendah, tidak perlu teknologi tepat guna, tidak banyak memakan banyak waktu dan tenaga adalah sangat disukai oleh petani peternak pada umumnya, apalagi harga ternak sapi potong selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Secara kelembagaan kelompok tani peternak, partisipasi petani peternak di Kelurahan Tanjung Harapan masih perlu didorong dan ditumbuhkembangkan, walaupun sekarang ini kelompok tersebut sudah dianggap sebagai kelompok tani mandiri dan dapat berfungsi sebagai kelompok unit produksi dan wahana kerjasama. Kelompok tani yang dibentuk masih memerlukan input-input (fisik dan nonfisik) dari pihak luar yang sifatnya hibah agar betul-betul mandiri.

Bila dilihat dari karakteristik pembentukan dan tata laksana kegiatan dalam kelompok, maka partisipasi petani peternak di Kelurahan Tanjung Harapan sudah sampai pada partisipasi fungsional, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok-kelompok baru untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan proyek. Proyek perencanaan dan pengambilan keputusan secara *bottom up* belum sepenuhnya murni dijalankan dengan program ini. Keterlibatan masyarakat tidak pada tahap permulaan seperti perencanaan, tetapi setelah keputusan utama dibuat, lembaga yang dibentuk cenderung tergantung pada inisiator atau fasilitator dari luar.

C. Sasaran Yang Dicapai Pada Bantuan Ternak

1. Terwujudnya Kelompok Tani Yang Mandiri

Kelompok tani sebagai salah satu organisasi memiliki beberapa komponen antara lain keanggotaan, kepengurusan termasuk didalamnya struktur organisasi, kepemimpinan dan kaderisasi, aturan-aturan serta administrasi kelompok. Organisasi kelompok tani yang berkualitas akan menunjukkan dinamika yang tinggi dalam setiap gerak. Dinamika inilah yang mendorong kelompok bergerak dalam mengembangkan usaha, permodalan dan jaringan kerja. Perkembangan kelompok tani dilihat dari keorganisasian, usaha, modal dan jaringan kerja adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.

Kelompok yang dinamis bukan berarti kelompok yang anggotanya selalu menurut saja apa kata pengurus, tetapi sebaliknya anggota dituntut untuk mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis demi kemajuan kelompok. Persoalan internal yang seringkali muncul di lapangan adalah komitmen anggota kelompok itu sendiri untuk maju dan berkembang. Sedangkan pihak luar lebih banyak ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan pendamping dalam menetapkan strategi pendekatan dan pengembangan kelompok. Dari pengamatan penulis di lapangan komitmen para anggota terhadap kemajuan kelompok masih harus ditingkatkan terutama di dalam memberikan masukan-masukan di luar rapat, baik diminta maupun tidak kepada pengurus agar kegiatan kelompok dapat mengarah pada kegiatan unit usaha lainnya, tidak vakum terlalu lama karena hanya mengandalkan kegiatan perguliran ternak dari dana BLM yang aktivitasnya hanya satu kali dalam satu tahun.

Dalam hal pengurus, setiap anggota memiliki hak untuk memilih dan pilih menjadi pengurus. Kriteria atau syarat yang ditetapkan untuk dipilih menjadi pengurus belum ada kesepakatan tertulis, namun berdasarkan wawancara dengan anggota diperoleh keterangan, bahwa pengurus dipilih dari sikap dan perilakunya yaitu jujur dan dapat bekerjasama dengan siapa saja, usahataniya lebih baik dibanding yang lain. Pengurus memiliki sikap dan perilaku yang baik, namun kemampuan manajerial masih kurang terutama di dalam menyusun strategi kelompok usaha dan mengembangkan peran serta para anggota untuk memajukan kelompok sebagaimana namanya sebagai kelompok usaha agribisnis peternakan.

Tabel 3. Perkembangan Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu hingga Desember 2012.

Elemen dan Komponen	Keadaan Sekarang Kelompok Tani
1. ORGANISASI a. Status kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - baru dibentuk pada tanggal 20 Maret 2004 - inisiatif dan pengambilan keputusan bersifat kompromis dengan pihak luar (PPL dan Proyek)
b. Orientasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - bersifat gotong royong dan insidental sesuai kebutuhan - pemanfaatan dana masih mengutamakan kegiatan bersifat fisik dan teknis budidaya - peranan kelompok tani lebih banyak diarahkan untuk mendukung atau melayani kebutuhan usaha anggota dalam meningkatkan produktivitas ternak - belum memiliki (arah) visi dan misi yang jelas bagi pengembangan keorganisasian kelompok tani - kegiatan berorientasi jangka pendek, perencanaan belum dilakukan secara berkesinambungan

c. Keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> - menjadi anggota setelah disetujui oleh pelaksana proyek atas rekomendasi PPL - motivasi utama menjadi anggota bukan kesadaran akan pentingnya keterlibatan untuk berkelompok - keanggotaan seseorang didasarkan atas pengaruh dari luar melalui seleksi CP/CL - pendidikan anggota cukup beragam dari SD hingga sarjana muda - persyaratan menjadi anggota belum ditentukan oleh kelompok tani sendiri
d. Kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> - pengurus ditentukan dan dipilih oleh anggota - kepengurusan terdiri dari 3 unsur: ketua, sekretaris, bendahara - proses pengambilan keputusan masih didominasi ketua, metode masih kurang mengakomodasi anggota kurang aktif/pasif di dalam pertemuan dan kurangnya wawasan pengurus dalam pengelolaan kelompok
e. Peraturan dan Cara Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - peraturan tertulis bersifat kasuistis sesuai perkembangan kelompok tani - pengendalian tergantung pada pihak luar (kontrol PPL/instansi terkait terhadap jenis kegiatan, pemanfaatan modal agar tepat sasaran)
f. Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - sarana administrasi masih sederhana - buku ada tetapi tidak lengkap, seperti buku notulen hasil rapat, buku kegiatan kelompok belum ada
2. USAHA : a. Orientasi usaha	<ul style="list-style-type: none"> - kelompok tani berperan untuk mendukung dan melayani kebutuhan anggota untuk meningkatkan produksi usaha ternaknya - usaha yang dilakukan diprioritaskan pada kegiatan usaha peternakan - jenis usaha para anggota masih berorientasi pada komoditas budidaya peternakan dan budidaya rumput laut sebagai usaha tani primer - merupakan peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang semi komersial (pola cabang usaha)
b. Penerapan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - sudah mendapat teknologi baru khususnya teknologi kawin suntik /inseminasi buatan (IB) yang direkomendasikan

c. Manajemen usaha	<ul style="list-style-type: none"> - belum ada usaha kelompok yang jelas, belum biasa bekerjasama dalam satu usaha - usaha dilakukan perorangan masing-masing anggota dalam skala kecil (rata-rata 5 ekor) - perhitungan-perhitungan ekonomi dan keuangan dilakukan para anggota walaupun secara tidak tertulis - efisiensi usahataniya diukur dari selisih nilai pembelian atau pemeliharaan dengan harga penjualan bila besar keuntungan maka dapat digunakan untuk membeli bibit baru atau sebagian digunakan untuk keperluan lainnya
d. Nilai produksi /penjualan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pasar lokal (Nunukan dan Tarakan) penawaran dan permintaan cukup tinggi
e. Lingkup usaha	<ul style="list-style-type: none"> - bagi para anggota usahanya sebagai cabang usaha pokok yang terintegrasi dengan kegiatan usahatani lainnya (budidaya rumput laut)
f. Jaringan usaha	<ul style="list-style-type: none"> - masih antar anggota - terbatas dalam lingkup yang relatif kecil (antar desa yang berdekatan)
3. PERMODALAN	
a. Sumber	<ul style="list-style-type: none"> - hibah dari pemerintah berupa ternak sapi bibit sebagai usaha bagi kelompok untuk dikembangkan
b. Cara pemupukan	<ul style="list-style-type: none"> - dari ternak hasil perguliran yang diberikan kepada anggota kelompok yang belum menerima sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama - belum ada upaya-upaya inovatif lainnya, seperti mengadakan usaha simpan pinjam bagi anggota kelompok maupun yang bukan anggota dengan tata cara tertentu - kas masih kosong, semua modal awal kelompok dipergunakan untuk memenuhi target program
c. Pemanfaatan modal kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - diarahkan pada usahatani untuk meningkatkan produksi ternak anggota sebagai cabang usaha - penyusunan laporan keuangan masih sederhana belum dilakukan menurut aktiva-pasiva/debet-kredit

<p>4. KERJASAMA :</p> <p>a. Jalinan yang dibuat</p> <p>b. Aturan kerjasama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - belum ada kerjasama yang jelas antar kelompok - kerjasama sebatas antar anggota - belum ada
---	---

Informan, Responden, diolah 2011

Elemen dan Komponen	Keterangan berdasarkan wawancara dan Pengamatan di Lapangan
<p>1. ORGANISASI</p> <p>a. Status kelompok</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dibentuk atas inisiatif pihak luar (proyek) - inisiatif dan pengambilan keputusan terhadap pembelian barang-barang produksi sebagaimana disampaikan oleh PPL/Proyek
<p>b. Orientasi kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaan HPT, pengadaan ternak sapi bibit (jantan 5 ekor dan betina 54 ekor) - penyediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan hewan bagi anggota - pelatihan-pelatihan teknis budidaya memelihara ternak sapi dan kebun hijauan pakan ternak. - pertemuan rutin kelompok hingga terakhir data diambil (April 2013) tidak dilakukan setelah kegiatan periode I tahun 2004/2007
<p>c. Keanggotaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut pendapat PPL, peternak yang dipilih yang pertama memiliki ternak minimal 2 ekor sapi dan kebun HPT kedua memiliki rasa kebersamaan dan mudah diajak bekerjasama - mau menjadi anggota atas kemauan sendiri karena memperoleh stimulan, yaitu mendapat pinjaman dana
<p>d. Kepeguruan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - peranan ketua dominan seperti kegiatan pertemuan rutin - proses pengambilan keputusan berdasar atas kesepakatan, usulan atau draft lebih dulu diajukan ketua (dibuat bersama PPL) - daur pemberdayaan belum dilaksanakan secara sistematis
<p>e. Peraturan dan Cara Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - perjanjian kelompok tani tentang ketersediaan - melakukan perguliran atau pelunasan ternak pemerintah dilakukan sesuai cara dan waktu yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian kerjasama

	<ul style="list-style-type: none"> - belum ada peraturan tentang mekanisme kerja tata cara keanggotaan, kepengurusan, usaha dan asas maupun tujuan, pembubaran organisasi kelompok, sanksi dan reward dan lain-lain (belum mengarah pada pembentukan AD/ART)
f. Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - sarana administrasi yang dimiliki : catatan keuangan (uang masuk dan keluar) dan dilaporkan setiap pertemuan rutin atau saat melakukan kunjungan ke instansi atau dinas yang membawahi kelompok tersebut
2. USAHA :	
a. Orientasi usaha	<ul style="list-style-type: none"> - menggulirkan/pelunasan temak kepada anggota yang belum mendapat bibit temak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama - pengadaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan hewan - informasi pemasaran bagi para anggota - penggunaan bibit unggul, obat-obatan sudah mulai diterapkan anggota kelompok - rata-rata kepemilikan temak di atas 2 ekor bahan makanan berupa hasil ikutan panen, rumput-rumputan alam dan hijauan pakan ternak (HPT) - tenaga adalah umumnya keluarga sendiri tujuan utama memelihara temak untuk menambah pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri
b. Penerapan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - sudah mendapat teknologi baru khususnya teknologi kawin suntik /inseminasi buatan (IB) yang direkomendasikan - penggunaan HPT dalam bentuk segar tanpa didukung makanan penguat seperti konsentrat dengan komposisi ransum yang sederhana
c. Manajemen usaha	<ul style="list-style-type: none"> - menurut pendapat para anggota lebih baik berusaha sendiri-sendiri karena melakukan usaha kelompok berarti harus bergantian kerja - budidaya dan pemasaran dilakukan masing-masing anggota - para anggota lebih senang melakukan pemeliharaan dengan cara semi ekstensif karena menurut mereka dengan cara tersebut temak tidak banyak memerlukan perhatian dan biaya (untuk kandang atau pedok, pupuk untuk pemeliharaan kebun HPT), terutama bila jumlah temak lebih dari 5 ekor
d. Lingkup usaha	<ul style="list-style-type: none"> - selain temak sebagai sumber pendapatan, juga sumber-sumber lainnya seperti budidaya rumput laut, kebun

	kelapa, pekerjaan sebagai buruh, pemborong, nelayan dan lain-lain
e. Nilai produksi/penjualan	- harga sapi di Kelurahan Tanjung Harapan termasuk tinggi menurut pendapat para anggota
f. Jaringan usaha	- saling tukar informasi pasar untuk pembeli dari luar kelurahan (Nunukan, Tarakan)
3. PERMODALAN	
a. Sumber	- dana penguatan modal berupa bantuan langsung masyarakat (BLM) dari program PPAP TA. 2004
b. Cara pemupukan	- melalui penguliran/pelunasan ternak kepada anggota kelompok yang belum menerima selama jangka waktu 5 tahun - melalui hasil penjualan ternak yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan usaha tani anggota
c. Pemanfaatan modal kelompok	- pembelian ternak sapi bibit dimana tiap anggota mendapat 3 ekor jantan untuk penggemukan dan 2 ekor betina untuk bibit - perluasan kebun hijauan pakan ternak (HPT) - penguatan dan perbaikan kandang - laporan rincian penggunaan dana BLM

Sumber : Informan, Responden, diolah, 2013

Proses penerapan pendampingan dalam memberdayakan kelompok tani, merupakan rangkaian tahapan (atau daur/siklus) yang terdiri atas beberapa tahapan yang masing-masing saling berhubungan erat. Hubungan ini dapat berupa hubungan input-output, sebab-akibat, atau hubungan lain yang menyatakan adanya keterkaitan satu bagian ke bagian lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya yang paling utama adalah target pencapaian yang harus dicapai pada akhir program dengan indikator-indikator tertentu yang telah dirumuskan secara jelas pada saat program direncanakan, yaitu :

- a. Tersalurinya dana penguatan modal langsung kepada kelompok sesuai kriteria dan efektifnya pemanfaatan dana tersebut, sesuai bidang usaha dan skala prioritas kebutuhan kelompok.
- b. Terjadinya peningkatan produksi/produktivitas usaha kelompok, peningkatan nilai tambah dan tercapainya pemupukan modal serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok penerima manfaat proyek.
- c. Tumbuhnya kelompok usaha agribisnis yang maju, berdaya saing dan mandiri yang mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi di pedesaan serta tumbuhnya kemitraan usaha antar kelompok dan dengan mitra usaha lainnya.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat adalah suatu proses fasilitasi dengan cara yang partisipatif untuk meningkatkan kemampuan/potensi diri atau kelompok miskin sumberdaya agar mampu mandiri untuk mencapai kesejahteraannya. Upaya pemberdayaan ini haruslah terarah yang dapat dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan lebih sejahtera, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yang meliputi langkah-langkah nyata dalam program khusus serta melindungi dalam arti mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Pendampingan dilakukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani.

Dilihat dari proses pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani melalui upaya pemberdayaan petani/kelompok tani yang dilakukan pemerintah melalui Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2004

apabila dilihat dari indikator proyek, yaitu terealisasinya bantuan ternak sapi bibit kepada masyarakat yang didistribusikan langsung kepada anggota kelompok tani penerima yaitu kelompok tani Sipurennu dan tersalurnya dana penguatan modal langsung kepada kelompok sesuai kriteria dan efektifnya pemanfaatan dana tersebut sesuai bidang usaha dan skala prioritas kebutuhan kelompok, telah terpenuhi. Dana untuk kelompok tani sasaran telah dialokasikan kedalam rekening kelompok tani terpilih dan telah dipergunakan oleh anggota/kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) ternak potong merupakan dana abadi untuk usaha budidaya ternak potong yang dialokasikan kepada kelompok terpilih, digunakan sebagai penguatan modal dalam rangka pengembangan kapasitas usaha kelompok yang sudah ada, untuk mengoptimalkan kinerja usaha budidaya ternak pada kelompok tersebut, menuju usaha kelompok yang mandiri.

Namun hal ini hanya dari sisi pelaksanaan proyek, dari sisi keberdayaan kelembagaan kelompok tani sebagai penerima manfaat proyek belum terwujud, sebagaimana indikator program pada Tabel 7 butir b dan c. Karena fasilitasi dana stimulasi yang sangat terbatas jumlahnya yang dialokasikan kepada kelompok sasaran dibandingkan dengan kebutuhan dana maksimal kelompok untuk membiayai kegiatan usaha budidaya ternak potong, maka alokasi dana PMUK diatur secara proporsional, dan kebutuhan biaya dan kegiatan lainnya diluar dari kemampuan/jangkauan dana PMUK, dapat menggunakan dana swadaya, atau sumber pembiayaan lainnya termasuk mengakses dana perbankan.

Rincian kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dana penguatan modal usaha kelompok adalah sebagai berikut .

Tabel 4. Proporsi Penggunaan Dana PMUK Budidaya Ternak Potong Berdasarkan Jenis Ternak Potong dan Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu.

Komponen Kegiatan	Jenis Ternak dan Proporsi Pembiayaan (%)		
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing Domba
Pembelian Ternak	85-90	85-90	80-85
a. Betina Produktif	60	90	85
b. Bakalan/Pejantan	40	10	15
Sarana Penunjang	10-15	10-15	15-20
1. Perbaiki Kandang	4	4,4	7,7
2. Pengembangan HPT	2	2,4	2,5
3. Pakan Konsentrat	4	-	4
4. Pengolahan Limbah Ternak	1,2	2	1,2
5. Obat-obatan dan Vitamin/Mineral	1,2	1,2	4,4
6. Administrasi Kelompok	0,4	0,4	0,4

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Penguatan Modal Usaha Kelompok , 2010

Dari data lapangan pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa indikator program pada butir b dan c belum tercapai. Potensi anggota kelompok tani belum sepenuhnya tergalinya untuk mewujudkan terbentuknya kelompok tani usaha agribisnis, belum ada akumulasi modal usaha kelompok, seperti tabungan kelompok, nilai tambah dari usaha yang dilakukan anggota kelompok, dari segi perilaku belum ada perubahan dari anggota kelompok dari kebiasaan bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja kelompok. Dilihat dari tingkat keberdayaannya melalui elemen-elemen didalamnya maka kelompok tani baru memasuki tahap tumbuh, sedangkan perkembangan kelompok, baru mencapai tahap lanjut dengan ciri-ciri sebagaimana pada Lampiran 1.

Apabila kelompok ini terus difasilitasi akan semakin cenderung berkembang keberdayaannya (tahap berkembang) dan selanjutnya akan menuju pada tahap keberdayaan yang besar (tahap telah berdaya), dengan catatan pengelolaan pemberdayaan kelompok tani dapat dilakukan dengan baik secara sistematis tahap demi tahap dan terarah.

Prinsip dasar dalam pengelolaan pemberdayaan petani menuju petani sejahtera adalah adanya sinkronisasi (kegiatan satu disesuaikan dengan kegiatanlainnya); koordinasi (yaitu kegiatan satu saling menunjang atau mengisi kegiatan lainnya) dan secara partisipatif (melibatkan kehadiran dan keaktifan semua anggota dan pihak lain yang terkait), serta berorientasi kepada kebutuhan kelompok tani, berdasar pada aspek yang realistis (berdasarkan pada kondisi yang faktual dan nyata), dan logis (sesuai dengan pola pikir yang banyak dianut masyarakat).

Berdasarkan pemahaman diatas, penyuluh sebagai tenaga pendamping di lapangan atau kelompok tani diharapkan menjadi lebih akrab dan menganggap pola pengelolaan pemberdayaan tersebut sebagai suatu kebiasaan untuk merencanakan langkah-langkah pengembangan kemandirian kelompok tani secara sistematis (tahap demi tahap), terarah (mempunyai tujuan yang jelas), dan logis (masuk akal dan tidak muluk-muluk). Pola pikir demikian dapat membantu mempercepat upaya pengembangan segala sumberdaya kelompok, dan bagi pihak luar kelompok akan memudahkan dalam memberi pelayanan kepada kemajuan kelompok tersebut secara lebih tepat.

Proses penerapan pendampingan dalam memberdayakan kelompok tani, merupakan rangkaian tahapan (atau daur/siklus) yang terdiri atas beberapa tahapan yang masing-masing saling berhubungan erat. Hubungan ini dapat berupa hubungan input-output, sebab-akibat, atau hubungan lain yang menyatakan adanya keterkaitan satu bagian ke bagian lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya yang paling utama adalah target pencapaian yang harus dicapai pada akhir program dengan indikator-indikator tertentu yang telah dirumuskan secara jelas pada saat program direncanakan, yaitu :

- a. Tersalurkannya dana penguatan modal langsung kepada kelompok sesuai kriteria dan efektifnya pemanfaatan dana tersebut, sesuai bidang usaha dan skala prioritas kebutuhan kelompok.
- b. Terjadinya peningkatan produksi/produktivitas usaha kelompok, peningkatan nilai tambah dan tercapainya pemupukan modal serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok penerima manfaat proyek.
- c. Tumbuhnya kelompok usaha agribisnis yang maju, berdaya saing dan mandiri yang mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi di pedesaan serta tumbuhnya kemitraan usaha antar kelompok dan dengan mitra usaha lainnya.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat adalah suatu proses fasilitasi dengan cara yang partisipatif untuk meningkatkan kemampuan/potensi diri atau kelompok miskin sumberdaya agar mampu mandiri untuk mencapai kesejahteraannya. Upaya pemberdayaan ini haruslah terarah yang dapat dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan lebih sejahtera,

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yang meliputi langkah-langkah nyata dalam program khusus serta melindungi dalam arti mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Pendampingan dilakukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani.

Dilihat dari proses pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani melalui upaya pemberdayaan petani/kelompok tani yang dilakukan pemerintah melalui Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2004 apabila dilihat dari indikator proyek, yaitu terrealisasinya bantuan ternak sapi bibit kepada masyarakat yang didistribusikan langsung kepada anggota kelompok tani penerima yaitu kelompok tani Sipurenu dan tersalurkannya dana penguatan modal langsung kepada kelompok sesuai kriteria dan efektifnya pemanfaatan dana tersebut sesuai bidang usaha dan skala prioritas kebutuhan kelompok, telah terpenuhi. Dana untuk kelompok tani sasaran telah dialokasikan kedalam rekening kelompok tani terpilih dan telah dipergunakan oleh anggota/kelompok sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) ternak potong merupakan dana abadi untuk usaha budidaya ternak potong yang dialokasikan kepada kelompok terpilih, digunakan sebagai penguatan modal dalam rangka pengembangan kapasitas usaha kelompok yang sudah ada, untuk mengoptimalkan kinerja usaha budidaya ternak pada kelompok tersebut, menuju usaha kelompok yang mandiri.

Namun hal ini hanya dari sisi pelaksanaan proyek, dari sisi keberdayaan kelembagaan kelompok tani sebagai penerima manfaat proyek belum terwujud, sebagaimana indikator program pada Tabel 3 butir b dan c. Karena fasilitasi dana stimulasi yang sangat terbatas jumlahnya yang dialokasikan kepada kelompok sasaran dibandingkan dengan kebutuhan dana maksimal kelompok untuk membiayai kegiatan usaha budidaya ternak potong, maka alokasi dana PMUK diatur secara proporsional, dan kebutuhan biaya dan kegiatan lainnya diluar dari kemampuan/jangkauan dana PMUK, dapat menggunakan dana swadaya, atau sumber pembiayaan lainnya termasuk mengakses dana perbankan. Rincian kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dana penguatan modal usaha kelompok adalah sebagai berikut .

2. Tersusunnya Program Pada Kelompok Tani

Sistem pemeliharaan ternak yang diterapkan di kelompok tani Sipurenu Kelurahan Tanjung Harapan dan kelompok tani Sinar Seimengkadu adalah semi ekstensif dan ekstensif, yaitu ternak dari pagi hingga sore hari dilepas di padang rumput atau kebun dan pada malam hari dimasukkan dalam kandang atau paddock dan diberi tambahan pakan rumput yang diaritkan, sedangkan secara ekstensif, ternak sehari-hari digembalakan di padang atau kebun, malam masuk paddock tanpa pakan tambahan. Sistem pemeliharaan yang diterapkan pada kedua kelompok tani tersebut yaitu dengan sistem semi ekstensif, sehingga untuk menjamin ketersediaan pakan hijauan, dan mengantisipasi semakin sulitnya mendapatkan pakan rumput alam yang semakin berkurang, maka anggota harus

memiliki lahan kebun hijauan pakan ternak (HPT). Jumlah kepemilikan lahan dan kebun HPT masing-masing anggota kelompok dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 . Luas Kepemilikan Lahan dan Kebun Hijauan Pakan Ternak Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurennu.

No.	Nama Anggota	Luas lahan yang dimiliki (Ha)	Luas Kebun HPT (Ha)	
			sebelum mendapat pinjaman dana kelompok	sesudah mendapat pinjaman dana kelompok
1.	Mar	4	0,25	1,5
2.	AS	5	0,50	1
3.	Her	3	0,25	1
4.	BC	1	-	1
5.	PA	1	-	1
6.	Pw	2	-	1
7.	ST	2	-	1
8.	Ar	5	2	2,5
9.	Jai	2	-	0,5
10.	Ram	2	-	0,5
11.	BO	2	-	0,5
12.	Ar	3	0,50	1
13.	MN	4	0,25	1
14.	MA	3	0,50	1
15.	AW	2	-	0,5
16.	MT	2	-	0,5
17.	NU	2	-	0,5
18.	MS	3	1	1
19.	MP	4	0,25	1
20.	Han	2	-	0,5
21.	Sud	6	0,50	2
22.	UK	2	-	1
23.	SU	2	-	1
24.	Ba	2	-	1
25.	Wa	2	-	1
26.	Bh	2	-	1
27.	UK	2	-	1

Sumber : Informan, diolah, 2013

Selain itu dalam rangka penguatan institusi/lembaga dari kelompok usaha agribisnis peternakan ini juga dilakukan pembinaan-pembinaan oleh instansi terkait, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Propinsi

Kalimantan Timur seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun bentuk pembinaan yang dilakukan bersifat sementara dan formalitas saja untuk memenuhi tertib administratif proyek. Pembinaan usaha oleh pemerintah difokuskan kepada pengembangan usaha budidaya ternak potong. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok peternak searah dengan Program Bantuan Langsung Bagian Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan yang telah ditetapkan. Pengembangan usaha budidaya ternak potong melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) di daerah akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat peternak melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Disamping itu pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pola pembinaan adalah dengan bertatap muka dengan para anggota yang dilakukan tergantung pada ketersediaan dana untuk melakukan perjalanan ke lokasi. Materi pembinaan langsung diserap dari informasi kelompok melalui diskusi dan bila ada masalah pembina memberikan masukan atau sekaligus solusi bagi kelompok. Menurut keterangan dari Kepala Bidang Produksi Budidaya dan Sumber Daya Ternak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang menangani program pemberdayaan ini, dengan sistem

bantuan langsung ke masyarakat (BLM) seperti pada Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP), maka kebutuhan pembinaan diajukan sendiri oleh kelompok termasuk menyediakan dana perjalanan untuk pembina yang diundang datang. Sehingga pembinaan terhadap materi-materi tertentu seperti keorganisasian akan dilakukan bila ada permintaan oleh kelompok.

Berdasarkan hasil analisis, pemberian pembinaan dibutuhkan kemampuan kelompok untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis sejauhmana kemampuan kelompok baik dari segi teknis seperti pemeliharaan ternak maupun non teknis seperti manajemen kelompok/organisasi, yang kekurangannya akan menjadi dasar catatan untuk membuat kebutuhan/kegiatan pembinaan kelompok, sehingga usaha agribisnis kelompok ini akan dapat berkembang sebagaimana diharapkan oleh anggota maupun masyarakat lainnya.

Dari sisi teknis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, menurut Kabid Produksi dan Sumber Daya Ternak, pembinaan tetap dilakukan secara khusus dalam bentuk-bentuk pelatihan karena anggota-anggota yang terpilih adalah petani ternak yang secara teknis belum sepenuhnya menguasai tentang teknologi peternakan tepat guna, walaupun sebenarnya adalah petani ternak yang sudah melakukan budidaya ternak sebelumnya, namun dari sisi modal masih diperlukan bantuan untuk menambah modal ternaknya agar dapat berkembang.

Berdasarkan data/informasi yang dikumpulkan, pembinaan yang dilakukan instansi belum memadai karena tidak melihat kemampuan kelompok petani secara keseluruhan dan seperti ada indikasi bahwa peranan petugas propinsi

atau kabupaten seolah-olah telah berkurang dalam program ini, sehingga tugas pembinaan di lapangan lebih dibebankan pada PPL dan keinginan para peternak itu sendiri. Padahal sesungguhnya justru dengan pola seperti inilah diharapkan adanya peningkatan peran petugas propinsi/kabupaten sebagai pendamping kelompok juga terutama sebagai pembuka akses-akses dan kerjasama kemitraan kelompok dengan lembaga lain dalam sektor agribisnis.

Melihat dari perkembangan ternak pada kelompok tani Sipurennu dan kelompok tani Sinar Seimengkadu yang masing memiliki pola bantuan yang berbeda dimana kelompok tani Sipurennu mendapatkan pembagian 2 ekor per kepala keluarga dan kelompok tani Sinar Seimengkadu mendapat 1 ekor per kepala keluarga memiliki perkembangan yang berbeda dimana yang mendapat 1 ekor bantuan kurang cepat perkembangan populasinya karena petani peternak kurang fokus dalam memelihara ternak.

Dilihat dari proses pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani melalui upaya pemberdayaan petani/kelompok tani yang dilakukan pemerintah melalui Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2002 pada kelompok tani Sinar Seimengkadu dan Proyek Pengembangan Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2004 pada kelompok tani Sipurennu, mempunyai perbandingan/perbedaan dalam beberapa dimensi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan/Perbedaan antara Kelompok Tani Sipurennu dengan Kelompok Tani Sinar Seimengkadu Berdasarkan pada Beberapa Dimensi sebagai Tolak Ukur

No.	Dimensi	Kelompok Tani Sipurennu	Kelompok Tani Sinar Seimengkadu
1.	Pola pembagian bibit ternak	2 ekor /kk	1 ekor/kk
2.	Sistem pemeliharaan	semi ekstensif	ekstensif
3.	Orientasi usaha	berorientasi pada usaha peternakan dan budidaya rumput laut (<i>off-farm</i>)	berorientasi pada usaha peternakan rakyat yang semi komersial (<i>on-farm agribusiness</i>)
4.	Penerapan teknologi	sudah mendapat teknologi baru khususnya teknologi inseminasi buatan yang direkomendasikan	menerapkan teknologi intensifikasi kawin alam melalui pembelian pejantan
5.	Pemanfaatan modal	pembelian ternak sapi bibit, perluasan kebun hijauan pakan ternak, pembuatan dan perbaikan kandang	diarahkan pada usaha tani untuk meningkatkan produksi ternak anggota
6.	Pemanfaatan limbah ternak	diolah melalui teknik pembuatan bokashi	pengolahan secara tradisional
7.	Pemanfaatan hijauan pakan ternak (HPT)	diolah dengan pembuatan hay dan silase	diolah dengan metode hay atau pengeringan
8.	Penjualan hasil ternak	ternak dipasarkan dengan sistem blantik atau bekerja sama dengan pemasar dari luar daerah	ternak dipasarkan didalam daerah sendiri berupa ternak hidup

Sumber : Informan, Responden, diolah, 2013

D. Dampak Bantuan Ternak Terhadap Kesejahteraan Petani Penerima

1. Pertambahan Populasi Ternak

Perkembangan populasi ternak kelompok tani Sinar Seimengkadu kelurahan Nunukan Selatan sebelum menerima bantuan penguatan modal hingga delapan tahun setelah menerima penguatan modal dimana pemerintah daerah memberikan kebijakan dibidang peternakan untuk mendistribusikan ternak sapi

bibit sebanyak 27 ekor untuk dikembangbiakkan, setiap anggota kelompok hanya memperoleh 1 ekor ternak sapi bibit. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kegiatan Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun 2004 yang mendistribusikan ternak sapi bibit sebanyak 59 ekor terdiri dari pejantan sebagai pemacek sebanyak 5 ekor dan betina sebanyak 54 ekor dimana setiap anggota kelompok mendapat 2 ekor bibit ternak.

Jumlah populasi awal ternak sapi kelompok tani Sinar Seimengkadu periode Desember 2002 - Desember 2007 sebanyak 105 ekor yaitu jantan 27 ekor dan betina 78 ekor sedangkan pada kelompok tani Sipurennu sebanyak 184 ekor yaitu jantan 49 ekor dan betina 142 ekor periode Desember 2004 hingga Desember 2007. Jumlah populasi akhir ternak sapi kelompok tani Sinar Seimengkadu periode Desember 2012 sebanyak 213 ekor yaitu jantan 49 ekor dan betina 164 ekor sedangkan pada kelompok tani Sipurennu sebanyak 399 ekor yaitu jantan 105 ekor dan betina 294 ekor periode Desember 2011 hingga Desember 2012, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 7. Perkembangan populasi awal dan populasi akhir ternak sapi dari kedua kelompok tani tersebut disebabkan karena kebijakan yang diterapkan pemerintah pada awal tahun 2002 untuk kelompok tani Sinar Seimengkadu memilih pola pembagian 1 ekor untuk setiap anggota kelompok, pola tersebut memiliki kelemahan dari segi perkembangbiakan ternak dimana bibit tersebut kurang mampu berproduksi secara maksimal karena kurangnya bibit ternak betina yang dimiliki setiap

anggota, selain faktor tersebut daya dukung pakan ikut mempengaruhi sistem reproduksi ternak.

Pada kurun waktu tersebut terjadi peningkatan populasi ternak yang sangat signifikan khususnya jumlah populasi awal (Desember 2004 - Desember 2007) hingga periode (Desember 2008 - Desember 2010), walaupun mengalami penurunan pada populasi akhir (Desember 2012), hal ini disebabkan karena adanya kesadaran dan perhatian dari setiap anggota kelompok untuk memelihara ternaknya baik dari segi kualitas pakan, adanya pemahaman dari setiap anggota kelompok akan pentingnya teknologi inseminasi buatan dan yang lebih penting adalah adanya rutinitas dari petugas medis dan paramedis untuk melakukan pengobatan atau vaksinasi terhadap ternak dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyakit menular ternak. Petani-peternak dalam kelompok tersebut memilih mengusahakan ternak sapi dengan beberapa tujuan. Bagi petani, ternak sapi berfungsi sebagai sumber pendapatan, protein hewani dan tenaga kerja serta penghasil pupuk, fungsi lain adalah sebagai penghasil bibit dan tabungan. Besarnya kontribusi ternak sapi terhadap pendapatan bergantung pada jenis sapi yang dipelihara, cara pemeliharaan dan alokasi sumberdaya yang tersedia di masing-masing wilayah.

7. Jumlah Populasi Awal Ternak Sapi (Periode Desember 2002 - Desember 2007) dan Populasi Akhir (Periode Desember 2012) Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sinar Seimengkadu Kecamatan Nunukan Selatan Penerima Bantuan Ternak Sapi Bibit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2002.

41457.pdf

No.	Nama Anggota	Perkembangan Populasi Awal dan Populasi Akhir Ternak Sapi Kelompok Tani Sinar Seimengkadu (Ekor)													
		Populasi Awal Periode Desember 2002 - Desember 2007						Total	Populasi Akhir Periode Desember 2012						Total
		Dewasa		Muda		Anak			Dewasa		Muda		Anak		
		(>18 bulan)		(12 bulan-<18)		(< 12 bulan)			(>18 bulan)		(12 bulan-<18)		(< 12 bulan)		
Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina				
1.	Fatimah	1	0	0	1	1	0	3	1	0	1	1	0	2	5
2.	Ardi	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	2	6
3.	Saharidin	1	0	0	1	1	1	4	1	2	1	2	1	3	10
4.	Eltam	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	2	0	4	7
5.	Abdul Fadli	1	0	1	1	0	2	5	1	1	1	3	2	4	12
6.	Suparno	0	1	0	1	1	1	4	1	2	0	2	3	1	9
7.	Halianto	0	1	0	2	0	1	4	0	2	0	2	2	2	8
8.	M. Awi	0	1	0	1	0	1	3	0	2	0	2	0	2	6
9.	Musa	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2	2	6
10.	Laila	0	1	0	0	2	0	3	0	2	0	3	1	3	9
11.	Nasir M	0	1	0	0	1	3	5	0	1	0	1	2	3	7
12.	Darwis	0	1	0	1	1	2	5	0	2	0	3	1	4	10
13.	Bacok	0	1	1	0	0	2	4	0	1	0	2	2	2	7
14.	Sise	0	1	0	1	0	2	4	0	2	0	3	1	2	8
15.	Nasir E	0	1	0	1	0	1	3	0	2	0	2	2	3	9
16.	Uding ND	0	1	0	2	1	1	5	0	1	0	2	1	2	6
17.	Canding	0	1	0	0	1	2	4	0	2	0	3	1	3	9
18.	Sudirman	0	1	0	1	1	1	4	0	1	0	2	2	2	7
19.	Anto PDR	0	1	0	2	0	3	6	0	2	0	3	1	2	8
20.	A. Sudin	0	1	1	2	1	2	7	0	1	0	1	2	1	5
21.	Mannurun	0	1	1	0	1	1	4	0	2	0	2	2	3	9
22.	Hanisa	0	1	0	1	0	1	3	0	2	0	3	2	2	9
23.	Dahlan	0	1	0	1	2	0	4	0	1	0	3	2	1	7
24.	Selamat	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	2	7
25.	Hasan	0	1	0	1	1	1	4	0	1	0	2	2	1	6
26.	Ansar	0	1	0	1	2	1	5	0	3	0	4	3	2	12
27.	Dardi	0	1	0	2	1	1	5	0	2	0	3	2	2	9
	Jumlah	5	22	4	24	18	32	105	5	42	3	60	41	62	213

Sumber : Pendataan PPL Kecamatan Nunukan Selatan, Informan, diolah 2013

abel 8. Jumlah Populasi Ternak Sapi Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurenu Periode Desember 2004 - Desember 2007
Periode Desember 2008 - Desember 2010 dan Periode Desember 2011 - Desember 2012.

No.	Nama Anggota	Perkembangan Populasi Ternak Sapi Kelompok Tani Sipurenu (Ekor)																				
		Periode Desember 2004 - Desember 2007						Total	Periode Desember 2008 - Desember 2010						Total	Periode Desember 2011 - Desember 2012						Total
		Dewasa		Muda		Anak	Dewasa		Muda		Anak	Dewasa		Muda		Anak						
		(>18 bulan)	(12 bulan-<18)	(< 12 bulan)		(>18 bulan)	(12 bulan-<18)		(< 12 bulan)		(>18 bulan)	(12 bulan-<18)	(< 12 bulan)									
Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina							
1.	Marsuki U	1	2	0	1	1	0	5	3	2	4	5	3	5	22	2	4	2	3	1	3	15
2.	A. Saparang	1	2	0	1	3	1	8	3	6	0	3	4	3	19	2	3	2	4	5	1	17
3.	Herman	1	2	0	2	1	1	7	3	3	4	1	3	5	19	2	3	2	5	2	4	18
4.	Baco	1	2	0	2	2	3	10	3	6	2	3	3	3	20	2	4	1	3	0	5	15
5.	Pt. Amir	1	2	1	1	2	2	9	3	6	5	1	3	6	24	1	3	3	4	4	6	21
6.	Pawa	0	2	0	2	2	1	7	0	3	3	1	3	3	13	0	3	1	4	5	1	14
7.	Siring T	0	2	0	2	0	1	5	0	4	4	3	0	5	16	0	3	2	4	2	3	14
8.	Aripuddin	0	2	0	2	1	1	6	0	4	4	3	3	3	17	0	3	0	5	1	2	11
9.	Jainuddin	0	2	0	1	1	0	4	0	2	1	3	3	4	13	0	3	1	3	3	2	12
10.	Ramlan	0	2	0	2	2	0	6	0	2	4	1	0	3	10	0	3	2	3	2	3	13
11.	Bonto	0	2	0	2	2	5	11	0	6	0	3	0	3	12	0	4	0	4	2	8	18
12.	Arman	0	2	0	2	3	7	14	0	5	2	4	3	6	20	0	3	1	3	5	8	20
13.	Moh. Noor	0	2	0	2	2	2	8	0	6	2	4	3	3	18	0	4	1	3	3	3	14
14.	Moh. Akil	0	2	0	1	0	3	6	0	4	0	3	0	5	12	0	3	0	4	1	6	14
15.	Awi	0	2	0	2	2	1	7	0	4	2	6	3	3	18	0	4	1	5	3	3	16
16.	M. Tahir	0	2	0	2	1	1	6	0	3	0	3	0	3	11	0	3	0	5	1	3	12
17.	Nurung	0	2	0	2	1	3	8	0	6	2	6	0	5	19	0	3	1	5	2	6	17
18.	M. Saleh	0	2	0	1	1	1	5	0	4	1	3	3	3	14	0	3	0	3	3	3	12
19.	Marsuki P	0	2	0	2	1	2	7	0	6	5	3	3	6	23	0	4	1	4	2	3	14
20.	Hamsah	0	2	0	1	1	2	6	0	6	2	3	0	3	14	0	3	0	4	2	4	13
21.	Sudirman	0	2	0	2	1	1	6	0	4	2	3	3	3	15	0	3	1	4	3	2	13
22.	Ukka	0	2	0	1	0	1	4	0	4	0	3	0	3	10	0	3	0	4	2	3	12
23.	Suarga	0	2	0	2	2	0	6	0	3	4	3	4	4	18	0	3	2	5	2	2	14
24.	Baktiar	0	2	0	2	0	0	4	0	4	4	5	0	3	16	0	4	1	5	1	2	13
25.	Waharuddin	0	2	0	1	1	1	5	0	4	2	3	3	5	17	0	3	1	4	3	2	13
26.	Bhudy R	0	2	0	2	2	2	8	0	6	4	1	6	5	22	0	4	2	4	4	3	17
27.	Undy Kuta	0	2	0	2	1	1	6	0	5	2	3	4	5	19	0	4	1	5	3	4	17
Jumlah		5	54	1	45	36	43	184	15	120	65	83	60	108	451	9	90	29	109	67	95	399

Sumber : Pendataan PPL Kecamatan Numukan Selatan, Informan, diolah 2013

Jumlah populasi ternak pada Desember 2008- Desember 2010 sebanyak 451 ekor yaitu 140 ekor jantan dan 311 ekor betina, kelahiran sebanyak 168 ekor dari 120 ekor induk, dengan demikian terjadi penambahan ternak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 278 ekor. Pada kurun waktu tersebut terjadi peningkatan populasi ternak hal ini disebabkan karena adanya kesadaran dan perhatian dari setiap anggota kelompok untuk memelihara ternaknya baik dari segi kualitas pakan, adanya pemahaman dari setiap anggota kelompok akan pentingnya teknologi inseminasi buatan dan yang lebih penting adalah adanya rutinitas dari petugas medis dan paramedis untuk melakukan pengobatan atau vaksinasi terhadap ternak dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyakit menular ternak. Jumlah kematian ternak sebanyak 19 ekor terdiri dari 7 ekor jantan dan 12 ekor betina, penjualan ternak sebanyak 23 ekor jantan dan pemotongan sebanyak 5 ekor jantan. Oleh karena itu, upaya untuk memberdayakan petani-peternak sapi diwilayah tersebut sangat perlu dilakukan melalui kebijakan pemerintah dengan pendekatan kelompok yang relevan sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani-peternak. Selain meningkatkan produktivitas ternaknya, seluruh anggota kelompok tani aktif melakukan budidaya rumput laut secara kontinu, yang diperoleh dari hasil penjualan ternak sendiri maupun dari hasil penjualan rumput laut. Penjualan sapi minimal dilakukan 2 kali dalam setahun, satu kali penjualan minimal 2 ekor. Keuntungan bersih menurut keterangan Marsuki U (Ketua Kelompok), dari satu ekor antara Rp. 1.500.000 hingga Rp. 2.500.000 (bila sapi yang digemukkan dari hasil pembelian pertama). Selain meningkatkan

produktivitas ternaknya, seluruh anggota kelompok tani aktif melakukan budidaya rumput laut secara kontinu, yang diperoleh dari hasil penjualan ternak sendiri maupun dari hasil penjualan rumput laut. Penjualan sapi minimal dilakukan 2 kali dalam setahun, satu kali penjualan minimal 2 ekor. Keuntungan bersih menurut keterangan Marsuki U (Ketua Kelompok), dari satu ekor antara Rp. 1.500.000 hingga Rp. 2.500.000 (bila sapi yang digemukkan dari hasil pembelian pertama).

Penyuluhan secara intensif dan kontinu, baik kepada petani, penyuluh maupun inseminator, dapat mendorong peningkatan produktivitas usaha ternak. Gould dan Saupe (1989) menganalisis umur, pendidikan, dan pelatihan sebagai variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam *off-farm*, pekerjaan usaha tani dan rumah tangga. Pelatihan termasuk pula penyuluhan bertujuan mengubah perilaku sumber daya petani peternak ke arah yang lebih baik.

Pada kurun waktu tersebut terjadi peningkatan populasi ternak dan berdampak pada peningkatan pendapatan. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan tentang : 1) bagaimana memilih/menyeleksi bibit sapi yang sehat dan mampu menghasilkan keturunan ternak secara baik dan benar (sehat dan mampu berkembangbiak); 2) mampu menyediakan kesinambungan persediaan pakan ternak dari pakan yang berkualitas, termasuk saat musim kering dengan teknologi pengawetan pakan; 3) menyediakan sistem perkandangan yang menetap (untuk sementara mereka diberi bantuan satu kandang yang permanen/kandang bersama); 4) adanya pemahaman dari setiap anggota kelompok akan pentingnya teknologi inseminasi buatan dan yang lebih penting adalah adanya rutinitas dari

petugas medis dan paramedis untuk melakukan pengobatan atau vaksinasi terhadap ternak dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyakit menular ternak; 5) pelaksanaan pemasaran ternak bila sudah waktunya untuk dijual.

Jumlah populasi ternak pada Desember 2011 - 2012 sebanyak 399 ekor yaitu 109 ekor jantan dan 294 ekor betina, kelahiran sebanyak 162 ekor dari 90 ekor induk, dengan demikian terjadi penambahan ternak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 261 ekor. Pada periode tersebut terjadi penurunan populasi ternak dibandingkan dengan jumlah populasi ternak pada Desember 2008 - Desember 2010 yang mengalami peningkatan populasi dengan jumlah 451 ekor, hal ini disebabkan karena adanya penjualan ternak yang dianggap tidak produktif lagi, terutama pada waktu menjelang Hari Raya Umat Islam (Idul Adha) selain itu tingkat penjualan dan pemotongan ternak yang tinggi. Alasan yang mereka kemukakan menjual pejantan yang sedianya untuk pemacek adalah karena memelihara jantan pemacek ternyata tidak mudah, harus ekstra tenaga dan butuh biaya pemeliharaan yang lebih besar karena membutuhkan pakan dan obat-obatan serta suplemen untuk memelihara kondisi badannya, sehingga menurut mereka tidak perlu terlalu banyak pejantan, cukup satu pejantan saja apalagi sekarang ini sudah ada penerapan teknologi peternakan tepat guna yaitu melalui inseminasi buatan (IB) atau introduksi pejantan unggul yang dipercayakan pada petani ternak yang dapat diandalkan untuk memeliharanya agar dapat dimanfaatkan oleh semua anggota kelompok atau petani ternak lainnya yang tidak dapat dijangkau pelayanan inseminasi buatan (IB).

Berdasarkan hasil pengamatan, peternak juga mudah tergoda menjual sapi pejantan apabila mendapat penawaran harga yang tinggi. Hal inilah yang sering terjadi selama ini sehingga terjadi *inbreeding* yang tinggi di Kelurahan Tanjung Harapan akibat sangat sedikit pejantan yang bagus karena cepat dijual. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah daerah melalui instansi Dinas Pertanian Tanaman dan Peternakan melakukan tindakan biosecuriti untuk pencegahan penyakit (tidak memasukkan ternak dari luar ke dalam kelompok. Tindakan lain yang dilakukan adalah melakukan frekuensi vaksinasi, penyucihamaan (*desinfectan*) 1 kali setahun, bila ditemukan gejala penyakit tahap ringan maka ditangani dengan menggunakan obat kimia dan herbal.

Menurut Wiliam N. Dunn dalam Kismartini, dkk (2012) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Analisis kebijakan adalah sangat penting karena dapat membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasikan persolan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menerjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan.

Desain program bantuan sosial yang efektif dan efisien, erat kaitannya dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kelayakan

penerima bantuan misalnya ketersediaan lahan untuk pengembalaan, ketersediaan hijauan pakan ternak, dan kesanggupan penerima bantuan dalam memelihara ternak yang diberikan dengan menandatangani kontrak perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan petani ternak. Desain program bantuan tersebut dipertegas kembali melalui pendapat yang dikemukakan oleh Arifin (2009) bahwa strategi pemberdayaan petani peternak dapat ditempuh melalui pengembangan usaha ternak dengan cara optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, berupa perluasan usaha, konsolidasi antar peternak, dan diversifikasi usaha.

2. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Ternak merupakan salah satu mata pencaharian anggota pada umumnya sebagai cabang usaha pokok selain dari sumber pendapatan lainnya. Adapun mata pencaharian atau sumber ekonomi bagi keluarga masing-masing anggota dapat dilihat pada Tabel 9. Kehidupan mereka secara umum cukup baik bila dilihat dari bangunan tempat tinggal sebagian besar telah permanen, anak-anak yang dapat bersekolah dan luas lahan pertanian serta kepemilikan kendaraan bermotor atau alat telekomunikasi seperti *handphone*. Pendapatan rata-rata di atas pendapatan rata-rata per kepala keluarga per bulan antara Rp. 2.000.000 - Rp. 4.000.000.

Usaha ternak dijalankan dengan penjualan ternak dari hasil budidaya ternak sapi potong. Pada umumnya mereka memelihara jenis sapi Bali yang memiliki tingkat kesuburan tinggi dan mampu memproduksi walaupun dengan pakan yang kurang baik mutu dan jumlahnya.

Setiap tahun rata-rata para anggota dapat menjual ternaknya minimal 1 ekor dengan harga antara RP. 5.000.000 - Rp.10.000.000 tergantung besar kecilnya ternak. Ternak tersebut dipasarkan di wilayah Nunukan dan Tarakan dengan bekerjasama dengan pemasar ternak di luar daerah (Blantik) dalam bentuk penjualan berupa ternak hidup harga ini termasuk tinggi menurut para anggota dibandingkan harga di luar Kelurahan Tanjung Harapan. Produktivitas ternak sapi tergolong lambat karena dalam satu tahun hanya dapat berproduksi satu ekor, untuk dapat dijual dalam bentuk bakalan diperlukan waktu pemeliharaan selama minimal dua tahun, dengan mengandalkan teknik budidaya kawin alam teknologi inseminasi buatan, maka semakin banyak induk betina subur yang dimiliki dan meningkatkan jumlah kelahiran ternak sapi untuk dijadikan bakalan yang dapat dijual setiap tahun, seperti Pt. Amir, Jainuddin, Arman, Ramli dan Hamsah setiap tahun dapat menjual ternak minimal 2 ekor.

Pasar dan harga yang kompetitif juga dapat merangsang petani untuk meningkatkan produktivitas ternak, termasuk yang dikelola secara tradisional. Namun, petani biasanya menjual ternak bila ada kebutuhan yang mendesak sehingga peternak tidak dapat menentukan harga. Selain itu, pedagang biasanya mendatangi petani ternak dalam membeli sapi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mondo (2002) yang menunjukkan pedagang yang juga sebagai peternak biasanya mendatangi petani-peternak untuk membeli ternak. Sebelum dipotong atau diperdagangkan antar pulau, pedagang biasanya melakukan penggemukan agar harga ternak lebih tinggi.

Tabel 9. Mata Pencaharian/Sumber Ekonomi Keluarga Anggota Kelompok Tani Usaha Agribisnis Peternakan Sipurenu.

No.	Nama Anggota	Sumber Ekonomi Keluarga Yang Diandalkan Menurut Nomor Urut	
1.	Mar	1. Kepala PAUD	3. Tani Rumput Laut
		2. Tani Ternak	
2.	AS	1. Tani Ternak	3. Petani
		2. Tani Rumput Laut	4. Nelayan
3.	Her	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
4.	Ba	1. Tani Rumput Laut	
		2. Tani Ternak	
5.	PA	1. Tani Ternak	3. Petani
		2. Tani Rumput Laut	4. Nelayan
6.	Pw	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
7.	ST	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
8.	Ar	1. Tani Rumput Laut	
		2. Tani Ternak	
9.	Jai	1. Tani Rumput Laut	
		2. Tani Ternak	
10.	Ram	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
11.	BO	1. Tani Ternak	3. Nelayan
		2. Tani Rumput Laut	4. Petani
12.	Ar	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
13.	MN	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
14.	MA	1. Tani Ternak	3. Petani
		2. Tani Rumput Laut	4. Nelayan
15.	Aw	1. Tani Ternak	3. Petani
		2. Tani Rumput Laut	4. Nelayan
16.	MT	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
17.	Nr	1. Tani Rumput Laut	
		2. Tani Ternak	
18.	MS	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
19.	MP	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
20.	Ham	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan

		2. Tani Ternak	
21.	Sud	1. Tani Ternak	3. Nelayan
		2. Tani Rumput Laut	4. Petani
22.	Uk	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
23.	Su	1. Tani Rumput Laut	
		2. Tani Ternak	
24.	Ba	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	
25.	WA	1. Tani Rumput Laut	
		2. Tani Ternak	
26.	BH	1. Tani Ternak	3. Petani
		2. Tani Rumput Laut	4. Nelayan
27.	UK	1. Tani Rumput Laut	3. Nelayan
		2. Tani Ternak	

Sumber : Informan, diolah 2013

Dalam menunjang pembangunan peternakan, pemerintah kabupaten Nunukan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Upaya ini dilakukan dengan memberikan bantuan ternak sapi bibit serta memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal (Direktorat Pengembangan Peternakan, 2004). Pemerintah sebagai *motivator, akselerator, regulator, fasilitator dan promotor* sangat berperan sangat berperan dalam pembangunan peternakan. Pemerintah kabupaten Nunukan telah menempuh berbagai cara, namun pembangunan peternakan sangat terkait dengan sumberdaya yang ada sehingga kebijakan pemerintah perlu didasarkan pada potensi daerah.

Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan adalah meningkatkan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan, kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan populasi ternak dengan memberikan bantuan ternak sapi bibit kepada kelompok tani. Salah satu kelompok tani

penerima bantuan tersebut adalah kelompok tani Sipurennu. Perkembangan populasi ternak kelompok tani Sipurennu sebelum menerima bantuan penguatan modal hingga delapan tahun setelah menerima penguatan modal, adalah sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 8. Dari Desember 2004 hingga Desember 2012 terjadi penambahan jumlah populasi ternak sapi dari hasil pembelian pejantan sebagai pemacek sebanyak 5 ekor dan betina sebanyak 54 ekor dari dana Kegiatan Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun 2004 sebagaimana telah disepakati bersama dalam kelompok, masing-masing anggota mendapat tambahan ternak sapi 2 ekor. Penambahan populasi ternak pada Desember 2004 hingga Desember 2007 sebanyak 184 ekor yaitu 42 ekor jantan dan 142 ekor betina, kelahiran sebanyak 79 ekor dari 54 ekor induk, dengan demikian terjadi penambahan ternak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 138 ekor.

Dilihat dari proses pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan petani melalui upaya pemberdayaan petani/kelompok tani yang dilakukan pemerintah melalui Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2002 pada kelompok tani Sinar Seimengkadu dan Proyek Pengembangan Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2004 pada kelompok tani Sipurennu, mempunyai perbandingan/perbedaan dalam beberapa dimensi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 10

Tabel 10. Perbandingan/Perbedaan antara Kelompok Tani Sipurennu dengan Kelompok Tani Sinar Seimengkadu Berdasarkan pada Beberapa Dimensi sebagai Tolak Ukur

No.	Dimensi	Kelompok Tani Sipurennu	Kelompok Tani Sinar Seimengkadu
1.	Pola pembagian bibit ternak	2 ekor /kk	1 ekor/kk
2.	Sistem pemeliharaan	semi ekstensif	ekstensif
3.	Orientasi usaha	berorientasi pada usaha peternakan dan budidaya rumput laut (<i>off-farm</i>)	berorientasi pada usaha peternakan rakyat yang semi komersial (<i>on-farm agribusiness</i>)
4.	Penerapan teknologi	sudah mendapat teknologi baru khususnya teknologi inseminasi buatan yang direkomendasikan	menerapkan teknologi intensifikasi kawin alam melalui pembelian pejantan
5.	Pemanfaatan modal	pembelian ternak sapi bibit, perluasan kebun hijauan pakan ternak, pembuatan dan perbaikan kandang	diarahkan pada usaha tani untuk meningkatkan produksi ternak anggota
6.	Pemanfaatan limbah ternak	diolah melalui teknik pembuatan bokashi	pengolahan secara tradisional
7.	Pemanfaatan hijauan pakan ternak (HPT)	diolah dengan pembuatan hay dan silase	diolah dengan metode hay atau pengeringan
8.	Penjualan hasil ternak	ternak dipasarkan dengan sistem blantik atau bekerja sama dengan pemasar dari luar daerah	ternak dipasarkan didalam daerah sendiri berupa ternak hidup

Sumber : Informan, Responden, diolah, 2013

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dan sebagaimana tujuan dari penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan sejauh mana upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui penyaluran ternak sapi bibit agar tepat sasaran serta menganalisis pola pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terkait, maka dapat disimpulkan sebagai berikut .

1. Proses pengelolaan program peningkatan kesejahteraan petani pada kelompok tani Sipurennu secara administrasi kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur program.
2. Dampak bantuan ternak bibit sapi pada masyarakat dengan pembagian 1 ekor/KK tidak memperlihatkan peningkatan kesejahteraan karena petani tidak fokus untuk memelihara ternaknya, sedangkan pembagian 2 ekor/kepala keluarga memperlihatkan hasil yang cukup baik, namun masih tetap dipadukan dengan adanya usaha yang lain, karena pembibitan sapi membutuhkan waktu lama baru bisa dipasarkan.
3. Seleksi calon penerima dan calon lokasi tidak mencapai sasaran karena belum adanya persamaan persepsi antara pusat, propinsi dan daerah dalam hal verifikasi dilapangan.
4. Pola pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terkait sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut, maka berikut usulkan pemecahan masalah dan diharapkan akan dapat berguna bagi perbaikan program pemberdayaan untuk kesejahteraan petani melalui kelompok.

1. Untuk memberdayakan kelompok masyarakat agar meningkatkan kesejahteraannya membutuhkan waktu dan kesabaran serta komitmen dari perumus kebijakan dan pelaksana program karena itu pola pembinaan dalam program peningkatan kesejahteraan petani pada suatu kelompok tani tidak hanya memperhatikan pelaksanaan dan kesinambungannya serta dituangkan dalam kegiatan program yang berimbang antara pengembangan komoditas dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya sebagai pengelolanya. Dalam operasionalnya program kegiatan sebaliknya dilakukan bertahap dan berkesinambungan dari waktu ke waktu, setiap kegiatan dari waktu sebelumnya menjadi dasar pengembangan kegiatan waktu berikutnya dengan prinsip partisipatif hingga kelompok sasaran memperlihatkan kemampuan dan kemandiriannya.
2. Mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang ada pada Dinas Peternakan, sebelum ditetapkan dalam satu kebijakan, dengan instansi-instansi terkait yang menangani pengembangan sumberdaya manusia pertanian seperti Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan, terutama yang berada di kecamatan, didalam menyiapkan tenaga para pendamping pemberdayaan kelompok tani

dan dengan pemerintahan desa untuk membantu operasional pelaksanaan pendampingan dan pengawasan di lapangan.

3. Peranan pemerintah daerah dalam mendukung satu kebijakan pembangunan yang bersifat partisipatif adalah sangat penting. Ini karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga kebutuhan rakyat setempat. Pengembangan usaha budidaya ternak potong didaerah akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya dan harus mampu memberi peluang usaha bagi masyarakat peternak melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Disamping itu pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Partisipasi pemerintah daerah yang sangat diperlukan dalam hal ini adalah :
 - (a) pengadaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi ketersediaan petugas atau tenaga-tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat petani peternak yang handal siap pakai yang menunjang tugas-tugas mereka sesuai dinamika pembangunan pertanian;
 - (b) penyediaan sumber dana berupa operasional atau tunjangan biaya pendampingan yang tidak berorientasi proyek; (c) penerapan metode

monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program yang berorientasi kinerja bukan hanya berorientasi pada prosedur proyek.

4. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan pada petani ternak, maka disarankan agar pemerintah memprogramkan pola pembibitan dikombinasi dengan budidaya (penggemukan) dengan pembagian 5 ekor ternak sapi, untuk bibit 3 (tiga) ekor dan untuk budidaya 2 (dua) ekor. Disamping itu dalam melaksanakan verifikasi dan seleksi calon penerima yang dilaksanakan oleh dinas terkait supaya dilaksanakan secara selektif sehingga bantuan dapat mencapai sasaran.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Hasil Evaluasi Program Pembangunan Peternakan dan Tinjauan Masa Depan melalui Perspective Analysis*. Dinas pertanian dan Kehutanan. <http://disnaksulsel.com>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2013.
- Abipraja. (2002). *Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep, Model, Kebijakan, Instrumen serta Strategi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anonimous. (2003). *Kemiskinan, Pendekatan dan Penanggulangannya*, Modul I-TOT Pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Lembaga Keuangan Pedesaan.
- Arifin. (2009). *Pemberdayaan Peternak Sapi Pesisir Garut Selatan melalui Introduksi Pengetahuan dalam Kegiatan Peningkatan Mutu Genetik Ternak*. Bandung: Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran.
- Bryant, C dan L.G White, (1982). *Managing Development In the third World*. Boulder Colorado: Westview Press
- Bogdan R. C; Biklen Kopp Sari (1972). *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods*. London: Allyn and Bacon, Inc.
- Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2011). *Pedoman Pengelolaan Dana, Jakarta: Bansos TA. 2011*
- Prasojo, E dkk . Pemerintahan Daerah, Cetakan Keenam (2011).
- Fatah, Abul, Mugnidin, E. Lodo, M.D., Triwahyudi, P. (2000). *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Pemberdayaan Kelompok Tani*, Buku Seri 1 Pemberdayaan Kelompok Tani. Departemen Pertanian Jakarta: Pusat Pembinaan Penyuluhan Pertanian.
- Gould, B.W. and W.E. Saupe. (1989). Off-farm labor market entry and exit. *Am.J. Agric.Econ.* 71(4): 960–969.
- Hardiyanto. (2007). Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Institut Pertanian Bogor. ISSN : 1978-4333. Vol.01 No.03.

- Hendayana. (2008). Pemberdayaan Petani-Ternak menuju Kemandirian Melalui Wahana Kelompok Usaha Bersama Agribisnis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Med. Pertanian, vol 24 No. 1
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat..* Bandung: Humaniora Utama.
- Irawan, P. (2005), *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*: Jakarta, STIA-LAN Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Makalah Power dan Empowerment, Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat* Pidato Kebudayaan disampaikan pada Peringatan Hari Jadi ke-28 Pusat Kesenian Jakarta-TIM, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Karsidi. (2008). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dan Nelayan Kecil. *Semiloka Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanaan Otoda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng, di Semarang 4-6 Juni 2002.*
- Kismartiny, dkk. (2012). Analisis Kebijakan Publik
- Loekman S. (2002). *Paradigma baru Pembangunan Pertanian : Sebuah Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta. Kanisius.
- Marzali, A. Konsep Pesisir dan *Kajian Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Miles, M., B. dan A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan., Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya,
- Mondo, M. (2002). *Analisis Keuntungan Perdagangan Antarpulau Ternak Sapi di Sulawesi Utara*. Skripsi. Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Poerwadarminta. (1986). *Kesejahteraan dan Kemakmuran*. Kelima. Jakarta: Bina Aksara

- Reidfield, R. (1982), *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta : Penerbit CV. Rajawali.
- Roosgandha E. (1988). *Partisipasi Sebagai Strategi Pemberdayaan Petani Miskin Melalui Program Integrasi Jagung dan Ternak*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Caser@indosat.net.id. Diakses pada tanggal 2 Mei 2013.
- Scott. C., D., dan D., T. Jaffe. (1994). *Empowerment Buliding a Committed Workforce*. London: Kogan Page Ltd. Pentoville Road
- Scott, J., C. (1994). *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Sitorus, B. (2002), *Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kelurahan (Suatu Studi di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda)*. Malang:
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Suradisastra, K. (2008). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. *Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Bogor. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No 2 Desember 2008.
- Suharto, E. (2006b). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (cetakan kedua)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Syahyuti. (2007). *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.
- Warya, A. (2005). *Peranan Penyuluh Pertanian sebagai Pendidik Petani dalam Mengembangkan Dinamika Usahatani di Propinsi Banten*, Disertasi, Program Pasacasarjana UNPAD, Bandung.
- Wiati, C. B. (2002). Beberapa Catatan dari Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. *Majalah Lembusuana*, Volume 1, No.12, hal. 15-17.

Wijono, D.B., D.E. Wahyono, P.W. Prihandini, A.R. Siregar, B. Setiadi, dan L.Affandhy. (2003). *Performans Sapi Peranakan Ongole Muda Pascaskrining. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Hendayana, R. dan Yusuf. (2003). Kajian Adopsi Teknologi Penggemukan Sapi Potong Mendukung Pengembangan Agribisnis Peternakan di Nusa Tenggara Timur. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan*, Bogor.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1.

CIRI-CIRI TAHAPAN PERKEMBANGAN KELOMPOK
(Bidang Organisasi, Usaha, Permodalan dan Jaringan Kerja)

Bidang : Organisasi

No.	Tahapan Komponen	Ciri-ciri perkembangan kelompok pada tahap :			
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1.	Orientasi	- Orientasi bersifat dan insidental sesuai kebutuhan	- Kerjasama antar anggota untuk kegiatan-kegiatan produktif jangka pendek	- Orientasi pada kegiatan jangka panjang dengan bertumpu pada kekuatan sendiri dalam memanfaatkan peluang usaha	- Orientasi pada kegiatan jangka panjang dan bekerjasama dengan pihak lain dalam memanfaatkan peluang usaha - Berperspektif gender
2.	Status	- Inisiatif dan pengambilan keputusan sangat bergantung pada pihak luar	- Inisiatif dan pengambilan keputusan bersifat kompromis dengan pihak luar	- Inisiatif dan pengambilan keputusan didominasi oleh kelompok	- Mandiri dan berswadaya

3.	Keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan seseorang didasarkan atas rasa kebersamaan sosial dan atau pengaruh dari luar 	<ul style="list-style-type: none"> - Masuknya anggota baru didasarkan pada azas manfaat - Belum ada seleksi terhadap penerimaan anggota baru - Sebagian kecil anggota terlibat aktif dalam memajukan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kriteria penerimaan anggota baru tetapi belum dilaksanakan secara konsisten - Ada keterikatan anggota untuk memajukan kelompok - Sebagian besar anggota terlibat aktif dalam memajukan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan secara sukarela dan terbuka - Penerimaan anggota didasarkan atas kriteria yang tegas dan konsisten - Adanya keterikatan anggota dalam kelompok untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak luar
4.	Kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pengurus dipengaruhi pihak luar - Peranan ketua sangat dominan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang mengatur mekanisme penetapan pengurus - Pengurus dipilih oleh anggota - Ada pembagian tugas pengurus tetapi belum sesuai ketentuan - Proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh ketua 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus ditetapkan secara demokratis - Pembagian tugas dan fungsi pengurus dijabarkan secara jelas tetapi belum di laksanakan secara konsisten - Proses pengambilan keputusan ditetapkan secara demokratis - Sudah mulai ada proses kaderisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus ditetapkan secara demokratis - Ada struktur organisasi yang jelas dan dipahami oleh semua anggota - Pengurus melaksanakan tugasnya secara profesional - Ada tahapan proses – proses kaderisasi yang jelas

5.	Peraturan dan Cara kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan masih bersifat lisan Aturan lisan lebih banyak ditetapkan oleh ketua 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan tertulis bersifat kasuistik sesuai perkembangan kelompok - Proses penyusunan aturan-aturan didominasi oleh pengurus dan pihak luar - Pengendalian tergantung pada pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> - AD/RT disusun secara demokratis, tetapi belum diterapkan secara konsisten - Pengendalian dilaksanakan oleh pengurus dengan didampingi pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> - AD/RT disusun secara demokratis dan dilaksanakan secara konsisten - Mempunyai sistem sanksi yang tegas dan efektif - Pengendalian secara transparan/terbuka
6.	Kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> - Secara administrasi masih sangat sederhana (mutu dan jenisnya) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada perangkat administrasi organisasi dasar dan terisi (Daftar Anggota dan Pengurus, Buku Tamu, Notulen) - Ada Perangkat administrasi keuangan dasar berupa arus kas masuk dan keluar serta rekapan kas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana administrasi organisasi ada dan berupa buku daftar anggota dan pengurus, buku tamu, notulen, agenda surat, AD/RT, dan inventaris - Sarana administrasi keuangan ada berupa arus kas masuk dan keluar, rekapan jurnal, kas, rugi laba dan neraca. - Memiliki sarana pendukung kegiatan (meja, kursi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana administrasi organisasi maupun keuangan lengkap dan berfungsi baik - Ada sistem pemeriksaan dari dalam yang efektif - Ada sistem pengarsipan yang teratur

Bidang : Usaha

No.	Tahapan Komponen	Ciri-ciri perkembangan kelompok pada tahap :			
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1.	Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan usaha masih bersifat tradisional - Belum ada usaha kelompok yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan usaha belum dilakukan secara berkesinambungan - Belum ada pengendalian usaha - Proses pengelolaan usaha masih tergantung pada petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan usaha dilakukan secara kontinyu - Usaha kelompok dan anggota memiliki keterkaitan dan saling mendukung - Proses pengelolaan usaha dilakukan oleh kelompok dengan bimbingan petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan usaha didasarkan atas analisis kelayakan (teknis, sosial, ekonomis) oleh kelompok - Diversifikasi usaha dilaksanakan secara terencana - Mampu mengelola aspek finansial secara mandiri - Pengendalian dan evaluasi usaha dilakukan secara berkesinambungan dan transparan
2.	Orientasi Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha tani yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha yang dilakukan diprioritaskan pada kegiatan usaha pertanian - Pemasaran hasil usaha tani dilakukan oleh masing-masing anggota 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi usaha mengarah pada pasar - Kelompok mampu memasarkan hasil usaha tani anggota 	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha kelompok berorientasi agribisnis

Bidang : Permodalan

No.	Tahapan Komponen	Ciri-ciri perkembangan kelompok pada tahap :			
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1.	Sumber	- Modal sendiri dari anggota	- Modal sendiri dan hibah	- Modal sendiri dan hibah tanpa mempertimbangkan kinerja modal swadaya	Kebutuhan modal diperoleh dari luar atas dasar kepercayaan terhadap kinerja modal swadaya
2.	Cara Pemupukan	- Simpanan anggota	- Simpanan anggota, bantuan (hibah), laba usaha	- Simpanan anggota, hibah, laba usaha	- Ada upaya-upaya inovatif yang bersifat pengembangan modal yang sudah ada
3.	Pemanfaatan Modal	- Pemanfaatan modal oleh anggota belum mengarah pada usaha produktif	- Pemanfaatan modal oleh anggota mengarah pada usaha produktif - Laporan keuangan belum tersusun secara sistematis	- Pemanfaatan modal didasarkan pada skala prioritas usaha - Laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi	- Pemanfaatan modal didasarkan pada skala prioritas usaha - Laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi - Ada sistem pemeriksaan keuangan oleh kelompok

bidang : Jaringan Kerja

No.	Tahapan Komponen	Ciri-ciri perkembangan kelompok pada tahap :			
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1.	Dengan pihak luar	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada kerjasama antar kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Inisiatif kerjasama diprakarsai oleh pembina - Kerjasama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada kerjasama atas inisiatif kelompok tetapi belum melembaga - Kerjasama mengarah pada pengembangan usaha bagi anggota dan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendasarkan pada prinsip kesetaraan - Mengoptimalkan keuntungan bagi kelompok dan anggotanya - Peningkatan jumlah hubungan kerjasama

Sumber : Pusat Pembinaan Penyuluhan Pertanian (2000:52-57)

KARTU WAWANCARA DAN KUESTIONER

TEMA PENELITIAN : DAMPAK BANTUAN TERNAK SAPI BIBIT TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI
(studi kasus pada kelompok tani Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan)

LOKASI PENELITIAN : DESI TODING DATU

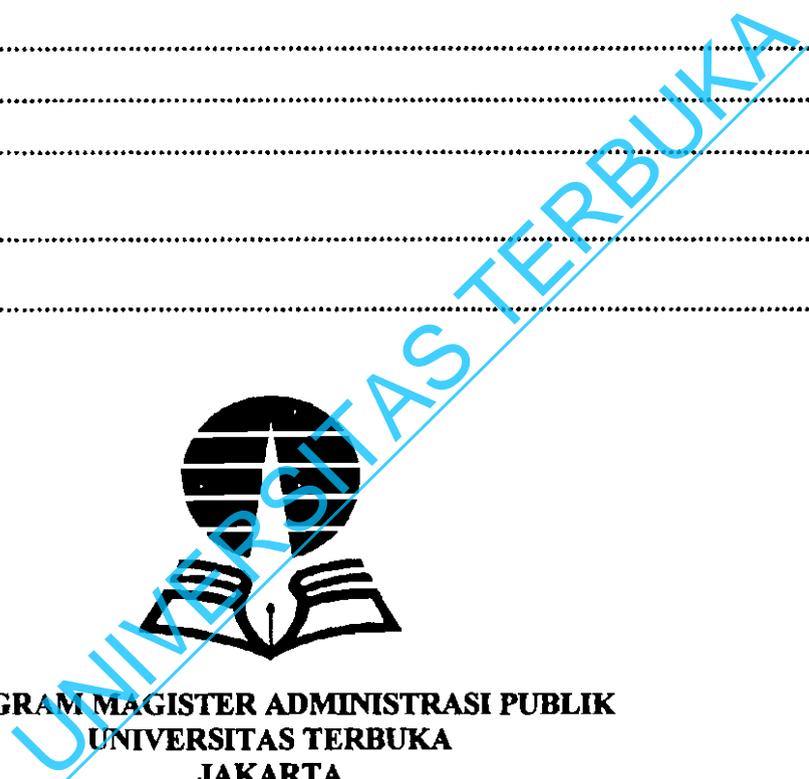
NAMA INFORMAN :

KATEGORI INFORMAN :

JABATAN INFORMAN :

ALAMAT/LOKASI :

KODE INFORMAN :



**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

KUESTIONER

Tentang seleksi calon penerima/calon lokasi bantuan ternak.

Pertanyaan diajukan kepada Petani, PPL, Kasie, Kabid dan Kepala Dinas dengan menjawab pertanyaan :

No.	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1.	Apakah seleksi CP/CL telah memenuhi syarat untuk kelompok sasaran ?			
2.	Apakah dalam seleksi ada kriteria untuk calon kelompok penerima ?			
3.	Apakah pemberian bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sesuai dengan usulan proposal ?			
4.	Apakah persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerimaan bantuan ternak sapi bibit ?			

Tentang sosialisasi program.

Pertanyaan diajukan kepada Petani, PPL, Kasie, Kabid dan Kepala Dinas dengan menjawab pertanyaan :

No.	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1.	Apakah setiap program yang diadakan dinas disosialisasikan terlebih dahulu ?			
2.	Apakah disampaikan setiap persyaratan pada saat sosialisasi ?			
3.	Apakah melibatkan PPL dan pemerintah setempat pada lokasi sosialisasi ?			

Tentang pendistribusian ternak bibit kepada masyarakat

Pertanyaan diajukan kepada Petani, PPL, Kasie, Kabid dan Kepala Dinas dengan menjawab pertanyaan :

No.	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1.	Apakah saat pendistribusian ternak, petugas dari dinas ikut mengawasi ?			
2.	Apakah ada persiapan – persiapan yang dilakukan saat ternak mau dibagi kepada petani ?			
3.	Apakah jumlah ternak yang dibagi sudah sesuai dengan harapan petani ?			

Tentang pelaporan hasil kegiatan

Pertanyaan diajukan kepada Petani, PPL, Kasie, Kabid dan Kepala Dinas dengan menjawab pertanyaan :

No.	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1.	Apakah ketua kelompok tani menyampaikan laporan perkembangan ternaknya setiap tahun ?			
2.	Apakah ketua kelompok melaporkan setiap penjualan yang dilakukan oleh anggota kelompok tani ?			
3.	Apakah kelompok penerima bantuan dapat membantu dinas dalam perguliran ternaknya kalau sudah tiba masa pergulirannya ?			

UNIVERSITAS TERBUKA

WAWANCARA

A. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK

1. Untuk mengetahui identitas anggota kelompok.
 - a. Nama
 - b. Jenis kelamin
 - c. Umur
 - d. Pendidikan terakhir
 - e. Jumlah ternak yang dimiliki sekarang ini
 - f. Latihan /kursus yang pernah diikuti

2. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kegiatan kelompok tani setelah dibentuk . Pertanyaan diajukan kepada Pengurus.
 - a. Dapatkah diceritakan latar belakang terbentuknya kelompok usaha peternakan ini ?
 - b. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan setelah kelompok dibentuk ? Mohon diceritakan mengapa kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan, apakah ada cara-cara atau mekanisme tertentu di dalam menetapkan kegiatan-kegiatan tersebut ?
 - c. Dapatkah diceritakan ke arah manakah kegiatan kelompok akan dikembangkan dan bagaimana strategi atau langkah-langkah yang diambil ?
 - d. Dapatkah diceritakan bagaimana sistem pemeliharaan dan cara pengembalian ternak bantuan serta bagaimana prosedur perguliran ternak ke anggota kelompok yang belum menerima ?
 - e. Dapatkah diceritakan bentuk-bentuk pembinaan maupun pelatihan-pelatihan yang kelompok/anggota terima sebelum dan setelah menerima bantuan ternak ?

3. Untuk mengetahui keaktifan dan wawasan anggota kelompok.
 - a. Dapatkah diceritakan kegiatan-kegiatan kelompok setelah adanya bantuan ternak didistribusikan kepada anggota ?
 - b. Dapatkah diceritakan bagaimana kegiatan pertemuan rutin yang dilakukan kelompok ?
 - c. Dapatkah diceritakan manfaat yang dirasakan selama ini dengan adanya kegiatan-kegiatan kelompok tani ?
 - d. Dapatkah diceritakan mengapa kelompok ini dibentuk ?
 - e. Apakah saran-saran bapak untuk kemajuan kelompok bapak ?
4. Sikap anggota kelompok.
 - a. Bersediakah bapak mengikuti aturan-aturan kelompok ? Mengapa ?
 - b. Bila ada pertemuan lain yang bersamaan dengan pertemuan kelompok yang sama pentingnya, manakah yang akan dihadiri ? Mohon diberikan penjelasan.
 - c. Bersediakah bapak apabila dipilih menjadi pengurus kelompok ? Mengapa ?
 - d. Setujukah bapak apabila pengurus kelompok diberi imbalan untuk mengurus kelompok ? Mohon dijelaskan bila setuju atau tidak.
5. Untuk mengetahui sejauhmana bantuan sapi bibit dalam meningkatkan pendapatan keluarga petani.
 - a. Berapa ekor bantuan sapi bibit yang dapat diterima oleh setiap anggota kelompok penerima bantuan ?
 - b. Dengan jumlah itu apakah cukup membantu untuk menopang kehidupan keluarga ?
 - c. Sudah berapa kali mengadakan penjualan ternak ?
 - d. Apa saja yang bisa ditanggulangi dari hasil penjualan sapi ?
 - e. Berapa ekor sapi yang bapak miliki sekarang ini ?
 - f. Sejauh mana pembinaan yang didapatkan dari dinas terkait ?
 - g. Selain bantuan sapi, bantuan apa saja yang telah diterima dari pemerintah ?

B. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TENAGA PENDAMPING DI LAPANGAN

1. Identitas tenaga pendamping.
 - a. Nama
 - b. Jenis kelamin
 - c. Umur
 - d. Jabatan
 - e. Pendidikan terakhir
 - f. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti
2. Dapatkah diceritakan perkembangan kelompok tani Sipurennu ini setelah menerima bantuan bibit ternak sapi ?
3. Dapatkah diceritakan pembinaan dan fasilitas yang diberikan oleh Dinas sejak awal persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ?
4. Dapatkah diceritakan metode apa yang diterapkan selama melakukan pendampingan, mohon dijelaskan mengapa metode tersebut digunakan ?

C. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PELAKSANA PROGRAM DI KABUPATEN**Latar Belakang**

Dari Dokumen Pedoman Umum Proyek Pemberdayaan Petani dan Agribisnis di Pedesaan Tahun Anggaran 2004, upaya fasilitasi pemberdayaan petani dan pengembangan kelembagaan kelompok peternakan difokuskan pada aspek-aspek :

- a. Manajemen usaha, mulai dari perencanaan usaha, penyusunan rencana usaha kelompok/RUK, permodalan, manajemen produksi, dan pemasaran; penguatan modal kelompok dimaksudkan sebagai stimulan untuk lebih memberdayakan modal kelompok yang sudah ada atau aset kelompok (ternak hasil perguliran).
- b. Teknis, antara lain mulai dari pembibitan, penggemukan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan spesifikasi lokasi.
- c. Kelembagaan, mulai dari kerjasama dalam kelompok, antar kelompok dan kemitraan usaha.

Untuk memberikan fasilitasi diatas, didalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa tingkat kabupaten disusun perencanaan teknis oleh Tim Teknis Kabupaten, dimaksudkan untuk merancang fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah agar para kelompok tani memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan sarana yang dibutuhkan dengan baik. Perencanaan teknis tersebut meliputi : rencana kebutuhan pengembangan SDM, rencana pengembangan kelembagaan, rencana pengembangan usaha kelompok, maupun pengembangan pemasaran hasil.

Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan diatas :

1. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk memberikan fasilitasi di atas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan ?
2. Bagaimana hasil fasilitasi tersebut di atas ?
3. Bagaimana evaluasi dampak pelaksanaan dari kegiatan pemberdayaan petani dan agribisnis (PPAP TA. 2004) ?
4. Bagaimana kelanjutan pembinaan kelompok yang telah mendapat bantuan pada TA. 2004 ?

D. PEDOMAN REVIEW DOKUMEN

- a. Data mengenai Proyek Pemberdayaan Petani dan Agribisnis di Pedesaan (PPAP) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004.
- b. Data mengenai kegiatan kelompok tani usaha agribisnis peternakan penerima Proyek PPAP Kabupaten Nunukan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan sejak dibentuk hingga waktu terakhir data diambil.
- c. Data kegiatan pendampingan di lapangan (susunan rencana kegiatan pendampingan, jadwal kegiatan pendampingan).
- d. Data kegiatan pembinaan oleh tim pembina teknis tingkat kabupaten.

E. PEDOMAN OBSERVASI

Rating Scale, yaitu pencatatan gejala menurut tingkat-tingkatnya (Hadi,2001 : 152). Terdiri dari suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku yang dicatat secara bertingkat. Skala mulai dari angka 1 sampai dengan angka 7.

1. Menyatakan misi dan tujuan dengan jelas

1	2	3	4	5	6	7
Kegiatan kelompok menunjukkan kurangnya fokus atau pemahaman terhadap misi dan tujuan kelompok					Kegiatan kelompok menunjukkan fokus dan pemahaman yang jelas terhadap misi dan tujuan kelompok	

2. Bekerja dengan kreatif

1	2	3	4	5	6	7
Kegiatan kelompok enggan bereksperimen dengan ide atau metode baru					Tim bereksperimen dengan ide baru dan melakukan pendekatan yang kreatif	

3. Fokus pada hasil

1	2	3	4	5	6	7
Kelompok tidak mencapai sasaran sesuai anggaran, jadwal, atau kualitas yang ditentukan					Kelompok mencapai sasaran sesuai anggaran, jadwal, dan kualitas yang ditentukan	

4. Kejelasan peran dan tanggungjawab

1	2	3	4	5	6	7
Peran dan tanggungjawab anggota kelompok tidak jelas					Peran dan tanggungjawab anggota kelompok jelas. Setiap anggota kelompok memahami apa yang harus dia lakukan	

5. Terorganisasi dengan baik						
1	2	3	4	5	6	7
Struktur, kebijakan, dan prosedur kelompok tidak terorganisasi/teratur				Struktur, kebijakan, dan prosedur kelompok jelas dan didukung oleh semua anggota kelompok		
6. Memanfaatkan kemampuan individual						
1	2	3	4	5	6	7
Pengetahuan, keahlian dan bakat anggota tidak dimanfaatkan secara penuh				Pengetahuan, keahlian dan bakat anggota tidak digunakan sebaik-baiknya		
7. Memberi dukungan pada pemimpin dan sesama anggota kelompok						
1	2	3	4	5	6	7
Peran pemimpin hanya dipegang oleh 1 atau 2 orang anggota, anggota lain tidak mendukung pemimpin kelompok				Peran pemimpin dipegang bersama dan didukung oleh semua anggota kelompok		
8. Mengembangkan iklim kerja kelompok						
1	2	3	4	5	6	7
Anggota merasa lebih baik bekerja sendiri-sendiri				Anggota bekerja bersama dengan tingkat energi dan keterlibatan yang tinggi, ada semangat kerjasama kelompok yang kuat		
9. Mengatasi perbedaan pendapat						
1	2	3	4	5	6	7
Perbedaan pendapat mempengaruhi produktifitas kerja				Anggota kelompok menghadapi perbedaan pendapat secara terbuka dan konstruktif		

10. Komunikasi secara terbuka

1	2	3	4	5	6	7
Komunikasi sehari-hari sangat terbatas dan berhati-hati					Komunikasi sehari-hari sering dilakukan, jujur, terbuka dan langsung	

11. Membuat keputusan yang objektif

1	2	3	4	5	6	7
Satu orang memecahkan masalah dan membuat keputusan untuk orang lain					Kelompok mengidentifikasi dan mengatasi masalah mereka dan mengambil keputusan yang efektif melalui kata sepakat	

12. Evaluasi terhadap efektifitas kelompok

1	2	3	4	5	6	7
Kelompok tidak mengevaluasi efektifitas mereka					Kelompok mengevaluasi efektifitas dinamika, metode, dan prestasi mereka secara berkesinambungan	

UNIVERSITAS TERBUKA

BIODATA PENULIS

1.	Nama	:	Desi Toding Datu
2.	Tempat/Tanggal Lahir	:	018396449
3.	Alamat	:	Jalan Pongtiku Nomor 48 Nunukan Tengah
4.	Status	:	Menikah (5 anak)
5.	Riwayat Pendidikan	:	-Tahun 1977 Tamat SDN To'Yasa Riu -Tahun 1981 Tamat SMPN Lempo -Tahun 1985 Tamat SMA Negeri Rantepao -Tahun 1991 Tamat dari Fakultas Peternakan Universitas Tadulako Palu
6.	Riwayat Pekerjaan	:	-Tahun 2001 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Pertanian Tanaaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan -Tahun 2004 – 2009 sebagai Kepala Seksi Pembibitan Ternak pada Dispertanak Kabupaten Nunukan -Tahun 2010 diangkat sebagai Pj Kepala Bidang Kelembagaan Petani pada Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan -Tahun 2011 sebagai Kepala Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan -Tahun 2012- sekarang sebagai Kepala Bidang Produksi dan Sumber Daya Ternak pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

Penulis,

Desi Toding Datu
NIM. 018396449